

**LOCAL BOSSES SEBAGAI MESIN PENDULANG SUARA
(STUDI DI DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA SLEMAN
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HALIMUDDIN SIREGAR

NIM. 08 370 018

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.A

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/ K.JS-SKR/ PP. 00.9/ 209/ 2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Local Bosses Sebagai Mesin Pendulang Suara
(Studi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya
Sleman dalam Pemilihan Legislatif 2014)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Halimuddin Siregar

NIM : 08 370 018

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Januari 2015

Dengan nilai : 90/A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQSAH

Penguji I/Ketua Sidang

2n

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Drs. M. Raza Ossim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 29 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimuddin Siregar
NIM : 08370018
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Local Bosses sebagai mesin pendulang suara (studi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Sleman dalam Pemilihan Legislatif 2014)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah benar asli adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Penyusun



Halimuddin Siregar
NIM. 08370018



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Halimuddin Siregar
NIM : 08 370 018
Judul Skripsi : *Local Bosses* Sebagai Mesin Pendulang Suara
(Studi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Sleman
dalam Pemilihan Legeslatif 2014)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *Jinayah Siyasa* (JS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rabiul Akhir 1436 H
26 Januari 2015 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680202 199303 1 003

ABSTRAK

Hadirnya “orang kuat” (*bos lokal*) dalam pileg maupun pilkada pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri dalam proses demokrasi yang terjadi di tingkat lokal. Kehadiran mereka dalam pandangan sebagian besar sarjana dianggap dapat menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung. Ini yang menjadikan “orang kuat” dalam pileg dan pilkada selalu disetigmatisasi sebagai hal yang negatif. Asumsi ini didasarkan pada maraknya praktik pemburuan rente dan korupsi yang dilakukan oleh “orang kuat” lokal melalui kontrolnya terhadap proses pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk *economical resources* yang ada di daerah. Kehadiran orang kuat dalam pilkada dan pileg lebih sebagai upaya mereka untuk mengamankan sumber-sumber daya daerah agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri dari pada menurut aturan-aturan resmi atau perundang-undangan yang dibuat oleh pelaksana peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimana lokal *bosses* di DPC Gerindra Sleman sebagai mesin pendulang suara dalam pemilihan legeslatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data diperoleh dari sumber-sumber informan, melalui wawancara dan observasi serta ditambah dengan bahan kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara *deskriptik kualitatif analitik* dengan menggunakan pendekatan normatif dengan proses berpikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa keberadaan bos lokal di DPC Gerindra Sleman berangkat dari adanya pengusaha dan tentara. Eksistensi mereka menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan, termasuk di dalamnya pendulangan suara di kantong-kantong daerah pemilihan. Kerekatan relasi didasarkan atas hubungan saling memanfaatkan dan mengekspresikan kepentingan yang sama antara orang kuat pengusaha bersama tentara partai tercipta pola hubungan *patron - client*. Dan untuk itu mereka sukses dalam berbagai konteks kekuasaan di DPC Gerindra Sleman, misal : 1) Berhasil mengintrodusir kepemimpinan presidium untuk mengeliminasi kepemimpinan sebagai ketua KMP di Kabupaten Sleman; 2). Sukses mengamankan pencalegan dengan menempatkan tujuh orang dari lingkaran kader-kader Gerindra yang militan untuk posisi Wakil Ketua Di Lembaga Legeslatif DPRD Sleman. 3). Berhasil memenangkan pileg 2014, yang menempatkan tujuh wakilnya menjadi anggota legeslatif, bila dibandingkan dengan pileg 2009 yang hanya menempatkan satu wakilnya di lembaga legeslatif kabupaten Sleman.

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta
Abang-Abangku dan Kakak-kakakku
serta Adik-adikku
Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليسنخلفنهم في
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي
ارضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي
شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

*Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi,
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan
Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka
dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembah-
Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.
Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu,
maka mereka itulah orang-orang yang fasik
(QS. an-Nūr [24]: 55).*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. أما بعد:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akh. Minhaji, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A, selaku Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
5. Ayahanda Ahmad Siregar, dan Ibunda Rosidah Ritonga yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa dan dana buat penyusun.
6. Abang-abang saya: Muhammad Dahrul Siregar, Samsir Siregar, Alfian Nasution, Ulong Bhakti Nasution, Atan Basong Siregar, Mahmud Siregar, Saikual Siregar, Muharram Siregar, Rikie Marjoenoe, S.H, Abdul Ghafur Ritonga, S.I.P dan abanganda Suherman yang selalu menginspirasi dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat. Kakak-kakak saya: Nurhasanah Siregar, Nurasiyah siregar, Saimah Rambe, Suriani Rambe, Mariatun Nasution, Halimatussa'diyah Siregar yang juga turut selalu memberikan arahan, nasehat dan motivasi disaat saya hampir putus asa;
7. Terima kasih saya juga teruntuk kepada Kakek Alm. Kh. Bahrin Ritonga dan Nenek Almh. Enon Asiyah Nasution yang semasa hidup mereka turut selalu

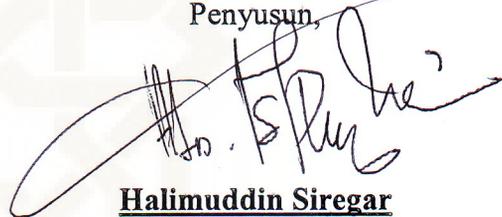
menyayangi dan mendidik cucunya ini agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agama dan negara tercinta. Doa saya selalu menyertai mereka semoga Allah SWT menempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya disisi Allah SWT Amin.

8. Kepada orang-orang yang menginspirasi saya Tuan Guru Rumah Persulukan Desa Tanjung Mulia Kh. Khoiruddin Rambe (Al-Kholidinnaqsabandiyah), Kh. Junib Siregar, Kh. Darbi Siregar, Kh. Aminuddin Rambe yang selalu memberikan dukungan moral maupun spritual kepada saya selama ini.
9. Seluruh teman-teman di Jurusan *Jinayah Siyasah* angkatan 2008 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib-seperjuangan, serta seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberi suport yang tidak mungkin penyusun sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.
10. Kepada teman-teman terdekat saya Mahadi Sipahutar, S.T.H.I, Jainal Pohan, Tambor Pasaribu, Suprima, S.Pd.I, Ahmad Husein Harahap, S.H.I, Syahnara Rambe, Ahmad Akhir Sitompul, Muhammad Ikhwanudin, Wahyu El-Jawi, Miftahul Rahmat dan Ahmad Priadi yang selalu membuat saya merasa senang dan gembira ketika berada diantara mereka. Kepada seluruh teman-teman saya berorganisasi di IKPM Sumatera Utara Yogyakarta, Himalabusel Yogyakarta, Himalabura Yogyakarta, Imta Yogyakarta, Ipmalay Yogyakarta dan KBAMRY (Keluarga Besar Alumni MAN Rantau Prapat Yogyakarta).
11. Terlebih lagi terima kasih saya buat sosok wanita tercinta Wiwid Lestari yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, selalu mengingatkan

saya disaat lupa akan tugas-tugas saya dan sosok yang selalu hadir menemani dimana dan disaat kapanpun selalu membuat saya tersenyum.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 8 Januari 2015 M
Penyusun,



Halimuddin Siregar
NIM. 08 370 018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā	ṡ	ṡ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	ṡ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fatḥah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Žukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yažhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fatḥah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِيّ	Fatḥah dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
اُوّ	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf [l] “ل” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan dengan “al” dan diikuti dengan kata penghubung “ - “.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-saiyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuḏūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أُمِرْتُ	umirtu
شَيْءٍ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laẓī unzila fihī al- Qur'an
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<i>ABSTRAK</i>	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BOSSES LOCAL</i> (ORANG KUAT	
 LOKAL.....	37
A.Orang Kuat Lokal	37
B. Bosisme Lokal.....	42
C. Hegemoni dan Dominasi Kekuasaan	50
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PARTAI GERAKAN INDONESIA	
 RAYA DEWAN PIMPINAN CABANG SLEMAN	
 YOGYAKARTA.....	73
A. Sejarah Pembentukan Partai Gerindra	73

B. Manifesto Partai Gerakan Indonesia Raya.....	76
C. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sleman.....	84
D. Visi, Misi, dan Tujuan Partai Gerindra.....	88
E. Tugas dan Fungsi	90

BAB IV: BOS LOKAL DALAM MENDULANG SUARA PEMILIHAN

LEGESLATIF 2014 DI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SLEMAN	93
A. Bos Lokal di Partai Gerindra Sleman	93
B. Bos Lokal dalam Pendulungan Suara di Pemilihan Legeslatif Sleman	103
1. Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Partai Gerindra	103
2. Dominasi Bos Lokal dalam Pendulungan Suara Pileg	113

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran-Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE.....

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

NAMA	HLM
Bagan 1: Struktur Kepengurusan Partai Gerindra Periode 2013-Sekarang	85
Gambar 1: Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum 2014	104
Tabel 1: Daftar Daerah Pemilihan Legeslatif dan Nama Calon Legeslatif Kabupaten Sleman Periode 2014-2019.....	105
Tabel 2: Jumlah Legeslatif Partai Gerindra dan Perolehan Suara dalam Pileg 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Sleman.	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran orang kuat dalam pemilukada ataupun Pileg pasca lahirnya UU No. 32 tahun 2004 hampir marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa liberalisasi politik dan pemilukada ataupun Pileg langsung telah membuka kran baru bagi seluruh lapisan masyarakat di tingkat lokal untuk ikut perkompetisi dalam pemilukada, serta menandai runtuhnya cengkraman militer dalam dunia politik.

Ironisnya, ketika pemilu langsung yang bebas diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat hanya dilihat sebagai bentuk pemenuhan dan tuntutan regulasi di mana prosedur-prosedur demokrasi menjadi lebih penting dibanding substansi demokrasi itu sendiri, maka dapat sangat terbuka kemungkinan pemilu yang hanya diwarnai oleh kompetisi antar elit dan tawar-menawar kepentingan semata dalam bahasa lainnya oligarki oleh elit politik atas demokrasi prosedural.¹ Di sinilah bos lokal (orang kuat) hadir ikut serta mewarnai proses demokrasi oligarki di tingkat lokal. Demokrasi oligarki merupakan bentuk pembajakan (*hijacking*) institusi politik formal negara oleh institusi politik informal, demi kepentingan segelintir elit politik.

Lebih lanjut, hadirnya “orang kuat” (*bos lokal*) dalam pileg maupun pilkada pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri dalam proses

¹Ahmad Husni Mubarak, “Pilkada dan Shadow State”, dalam Gregorius Sahdan dkk., (Ed), *Negara Dalam Pilkada Dari Collapse State ke Weak State*, (Yogyakarta: IPD Press, 2008), hlm. 52

demokrasi yang terjadi di tingkat lokal. Kehadiran mereka dalam pandangan sebagian besar sarjana² dianggap dapat menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung. Ini yang menjadikan “orang kuat” dalam pilkada selalu disetigmatisasi sebagai hal yang negatif. Asumsi ini didasarkan pada maraknya praktik pemburuan rente dan korupsi yang dilakukan oleh “orang kuat” lokal melalui kontrolnya terhadap proses pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk *economical resources* yang ada di daerah. Kehadiran orang kuat dalam pilkada dan pileg lebih sebagai upaya mereka untuk mengamankan sumber-sumber daya daerah agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri dari pada menurut aturan-aturan resmi atau perundang-undangan yang dibuat oleh pelaksana peraturan yang lebih tinggi. Upaya untuk menguasai alokasi sumberdaya ini mereka lakukan dengan cara menempatkan anggota keluarga, kroni-kroninya dalam jabatan strategis atau bahkan menempatkan dirinya sendiri dalam jabatan tertinggi yang ada di daerah.

Desentralisasi tidak otomatis meningkatkan politik ke arah yang lebih demokratis. Seringkali desentralisasi menjadi kontraproduktif bagi demokrasi. Dibutuhkan banyak usaha agar sistem politik yang telah terdesentralisasi benar-benar mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat dan mencegah kekuatan kelompok dominan dengan kemampuan fisiknya memanipulasi proses pemilihan umum di tingkat lokal. Tidak mengherankan apabila muncul

²Lihat John T. Sidel, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia”, dalam John Harriss dkk., (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, (Jakarta: Demos., 2005). Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, (Princeton: Princeton University Press, 1988); Syarif Hidayat, “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten”, dalam Henk Schulte dan Gerry van Klinken (Ed.), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

fenomena “mafia-mafia” dalam pemerintahan lokal yang semakin menjauhkan rakyat dari proses politik.³

Desentralisasi di negara berkembang dalam prakteknya terkadang dipenuhi dengan konflik ekonomi, problem kinerja dan masalah korupsi. Elit di tingkat lokal lebih berhasil memanfaatkan desentralisasi dengan menguasai berbagai kelompok kepentingan ketimbang aktor-aktor lainnya. Arena elektoral yang kecil di tingkat lokal dijadikan ajang konsolidasi dan bertahannya kelompok otoritarian.⁴

Proses desentralisasi di negara berkembang seperti yang terjadi di Indonesia kerap kali disamakan dengan proses demokratisasi dan tumbuhnya *civil society*. Padahal ketiga proses tersebut merupakan proses yang berbeda. Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan tidaklah sama artinya dengan peralihan dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan juga tidak secara otomatis menyiratkan terjadinya pergeseran dari negara yang kuat beralih menjadi *civil society* yang kuat. Melemahnya negara di tingkat pusat tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi yang bertambah di tingkat lokal.

³Rajni Kothari, “Issues in Decentralized Governance”, dalam S.N. Jha dan P.C. Mathur (eds), *Decentralization and Local Politics*, (New Delhi : Sage Publications, 1999), hlm. 50-51.

⁴Merilee S. Grindle, *Going Local : Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance*, (Princeton : Princeton University Press, 2007), hlm. 7-9.

Desentralisasi dalam kondisi tertentu justru bisa diikuti oleh pemerintahan yang otoriter.⁵

Joel S. Migdal melihat fenomena di atas sebagai akibat bertahannya pengaruh “orang kuat lokal” di arena politik lokal. Kekuatan pengaruh dari “orang kuat lokal” bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat birokrasi negara di tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” berhasil menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat.⁶

Vedi R. Hadiz juga melakukan analisa mengenai fenomena “orang kuat lokal”, mesin politik lokal yang korup dan daya tahan beberapa kelompok otoritarian di kawasan Asia Tenggara yang sedang mengalami reformasi politik seperti Filipina, Thailand dan Indonesia. Justru melalui slogan tata pemerintahan yang baik, desentralisasi memberikan jalan bagi kebangkitan dan konsolidasi “orang kuat lokal”. Secara nyata desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan predatoris atau penghisap lokal.⁷

⁵Henk Schulte Nordholt, “Decentralization in Indonesia: Less State, More Democracy?”, dalam John Harriss dkk., (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, (Jakarta: Demos., 2005), hlm. 29-30.

⁶Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, hal 88-93.

⁷Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, (Stanford : Stanford University Press, 2010), hlm. hal 3-4.

Beberapa peneliti *Institute of Asian Studies* yang berbasis di Hamburg, Jerman misalnya melakukan penelitian mengenai demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Hasilnya menurut mereka ada beberapa kecenderungan yang terjadi di dalam desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi memberikan efek samping meningkatnya korupsi di daerah, meningkatnya politik uang, meningkatnya konsolidasi oligarki lokal, meningkatnya penggunaan sektarianisme dan kebangkitan primordialisme. Melalui intimidasi, diskriminasi dan kekerasan politik, desentralisasi berhasil dimanfaatkan oleh oligarki elit lokal. Oligarki elit lokal tersusun dari birokrat karir, pengusaha kaya, politisi partai dan anggota DPRD.⁸

Fenomena kemunculan “orang kuat lokal” di era desentralisasi juga berlangsung di Indonesia. Hampir semua pengamat dan pemerhati Indonesia sepakat bahwa desentralisasi telah melahirkan “orang kuat lokal” yang memiliki akar di daerah. Politik uang dan kekerasan kian mewarnai pertarungan politik lokal. “Orang kuat lokal” mengandalkan agen-agen kekerasan yang secara kultural sudah ada sebelumnya seperti jawara di Banten atau dengan membentuk milisi-milisi baru. Selain memperalat partai politik, “orang kuat lokal” di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan mengeksploitasi politik etnis dan agama. Kekuatan politik etnis jauh lebih

⁸Marco Bunte dan Andreas Ufen (Eds), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London: Routledge, 2009), hlm. 18-21.

relevan di tingkat daerah ketimbang di tingkat nasional. Demikian juga hubungan darah, klan dan keluarga.⁹

Politik lokal di Indonesia era desentralisasi menjadi ajang elit lokal memanfaatkan demokrasi elektoral untuk mengamankan jabatan eksekutif dan legislatif tingkat lokal kepada keluarga, kroni dan loyalis mereka. Beberapa “klan politik” berhasil menjadikan Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota sebagai daerah kekuasaannya dan menjauhkan desentralisasi dari demokrasi “akar rumput”. Kemampuan elit lokal tersebut ditunjang oleh kekayaan dan kemampuan politiknya untuk melakukan pembelian suara ataupun memanipulasi kesetiaan religius dan etnik masyarakat setempat.¹⁰

Pada penghujung abad dua puluh demokrasi telah menjadi pilihan dari elit maupun masyarakat yang merindukan terwujudnya masyarakat yang terbuka. Rezim otoritarian yang korosif telah mengikis terlalu lama kebebasan sipil. Selain itu, demokratisasi dianggap menjadi alternatif bagi negara dunia ketiga yang mengalami krisis. Sejarah telah menunjukkan bahwa demokratisasi di regional Asia Tenggara khususnya di Indonesia telah menempuh trajektori yang hampir serupa, krisis politik dan ekonomi telah menjadi katalisator bagi runtuhnya otoritarianisme. Namun demikian, sebagaimana yang umumnya terjadi pada negara-negara Asia Tenggara, dan ironisnya, demokratisasi tidak

⁹Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos“, dalam Jurnal *Prisma* Volume 28 Nomor 2 Oktober 2009, hlm. 26.

¹⁰Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, (Singapura : ISEAS, 2010), hlm. 7-15.

diikuti dengan konsolidasi demokrasi, menuju pada zona abu-abu yang umumnya kurang mendapatkan perhatian oleh para penganjurannya.¹¹

Di sisi lain, pemerintahan yang sentralistik, yang identik dengan pemerintahan otoritarian perlu disusun ulang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal, pihak yang kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Sejalan dengan ini, desentralisasi dianggap sebagai seperangkat kelembagaan yang paling tepat dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, responsif dengan mendekatkan negara dengan masyarakat. Demokrasi dengan desentralisasi sebagai *panacea*, khususnya yang terjadi Indonesia, memiliki kecenderungan untuk dibajak oleh kepentingan-kepentingan predatoris yang mampu secara cekatan beradaptasi dengan lingkup politik baru yang demokratis. Sebenarnya ada banyak aspek turunan dari argumen bahwa demokrasi Indonesia cenderung hanya menjadi panggung dari pementasan aktor-aktor dengan masing-masing kepentingannya yang haus terhadap kekayaan dan kekuasaan, namun pada konteks ini penulis hanya membatasi pada peran lokal boses dalam mendulang suara di Pemilu.

Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014 sudah selesai dilakukan. Dinamika kampanye bervariasi terjadi di seluruh pelosok negeri. Kampanye dengan suasana berbeda akan kembali berlangsung untuk Pilpres mendatang. Hal yang penting dilakukan adalah melakukan evaluasi demi perbaikan kualitas ke depan. Pertarungan dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yakni pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla

¹¹Thomas Carothers, "The 'Sequencing' Fallacy", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 18, No. 1, Januari, 2007, hlm. 15-20.

(JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa semakin hangat. Berbagai cara dilakukan dua pasangan itu agar bisa mendulang suara pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

Pertarungan dua kubu capres itu semakin sengit. Saat ini, perebutan kursi untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia tidak hanya diramaikan dengan berbagai bentuk kampanye negatif atau kampanye hitam. Dua poros capres juga berebut sosok yang dianggap bisa menjadi penarik massa pendukung, terutama dari kalangan artis dan tokoh-tokoh pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas). Strategi menggunakan tokoh-tokoh yang memiliki pendukung besar selalu digunakan partai politik (parpol) setiap pemilihan umum (pemilu), terutama setelah Era Reformasi. Bahkan, ada salah satu parpol yang kini diidentikkan dengan partai artis, karena setiap pemilu legislatif (pileg) partai itu mengusung sejumlah artis untuk menjadi calon wakil rakyat. Selain artis, sosok lain yang diajak untuk ikut serta mendulang suara adalah tokoh-tokoh ormas, terutama ormas keagamaan.

Capres yang bertarung pada Pilpres 2014 juga turut berebut dukungan dari tokoh dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal itu wajar, karena dua ormas itu memiliki massa pendukung yang jumlahnya masing-masing mencapai puluhan juta orang. Yang menjadi persoalan, muncul kesan kalau ormas keagamaan terbelah gara-gara dukungan terhadap salah satu kubu capres. Contohnya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama-nama tokoh

pendukung pasangan Jokowi-JK. Sedangkan, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan tokoh NU Mahfud MD secara tegas menyatakan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo-Hatta.

Fakta itu bisa ditambah dengan kunjungan para pasangan capres-cawapres ke kiai-kiai NU di beberapa daerah, terutama di Jawa. Pada dasarnya, ormas keagamaan, baik NU maupun Muhammadiyah bersikap netral pada panggung politik Tanah Air. Dasar perjuangan mereka memang bukan di panggung politik, tapi pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama pendidikan. Oleh karena itu, dua ormas itu pernah menegaskan posisi mereka pada panggung politik Indonesia.

Kini, situasi politik yang kian hangat menjelang Pilpres 2014 membuat para tokoh ormas ikut tertarik untuk melibatkan diri dalam tim pemenangan salah satu capres. Meski mereka beralih sikap politik itu merupakan sikap pribadi, tentu para capres berharap agar tokoh-tokoh ormas itu bisa menarik dukungan massa mereka. Memang, tidak ada larangan bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk menentukan sikap dan dukungan politik mereka kepada salah satu capres. Namun, dukungan itu jangan sampai mencederai perjuangan sosial kemasyarakatan organisasi tempat mereka bernaung saat ini. Bangsa ini tentu ingin agar sikap politik para tokoh ormas itu tidak didasari pada pragmatisme belaka. Harapan kabar yang berembus bahwa keikutsertaan tokoh-tokoh itu karena iming-iming uang dan jabatan, tidak benar dan hanya bentuk kampanye hitam.

Rakyat ingin agar para tokoh ormas itu ikut ke salah satu capres karena mereka menilai kandidat itu memiliki visi dan misi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan umat. Kehadiran tokoh-tokoh ormas dalam panggung politik harus benar-benar didasari pada niat untuk memperbaiki dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Tulisan ini ingin menelisik-menelusur tentang elite partai di aras lokal, dalam penelitian yang dilakukan di salah satu partai politik Gerakan Indonesia di DPC Kabupaten Sleman ditemukan variasi, relasi dan interaksi antar elite: dalam rangka berebut suara dalam menempatkan wakil-wakilnya dalam suatu kekuasaan. Kemudian menbentangkan strategi mereka mendapatkan, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan secara terorganisir di partai politik dengan cara demokratis atau sebaliknya. Bertolak dari latar belakang ini, penyusun ingin mengangkat tema lokal bosses dalam mendulang suara, penulis ingin menunjukkan “wajah baru” dari bos lokal dalam mengelola tata pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam kajian ini penulis ingin mengatakan bahwa kehadiran “orang kuat” dalam mendulang suara apakah selamanya memiliki stereotip negatif sebagaimana yang dibayangkan oleh para sarjana di atas.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana lokal bosses di DPC Gerindra Sleman sebagai mesin pendulang suara dalam pemilihan legeslatif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lokal bosses di DPC Gerindra Sleman sebagai mesin pendulang suara dalam pemilihan legeslatif

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Penyusun, penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan Ilmu politik Islam melalui kegiatan penelitian.
- b. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan memberikan hasil dan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini.
- c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi kajian politik Islam terutama dalam bidang pemikiran tentang lokal bosses dalam mendulang suara di Indonesia dalam pemilihan legeslatif, khususnya di daerah wilayah Sleman.

3. Kegunaan Praktis

- a. Yaitu memberikan masukan pada instansi pemerintahan dan para pembaca untuk lebih memperhatikan masalah lokal bosses dalam mendulang suara di Indonesia dalam pemilihan legeslatif.
- b. Diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai lokal bosses di Indonesia.

- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya politik Islam tentang pandangan Islam dalam menyikapi lokal bores di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penyusun akan menelaah karya-karya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik dari permasalahan penting atau tidaknya local bores dalam mendulang suara. Di antara karya-karya atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Peneliti pertama yang dilakukan oleh Jainuri dengan judul “Orang Kuat Partai Di Aras Lokal : *Blater Versus Lora* Dalam Percaturan Politik”.¹² Dalam penelitian ini, pelajaran yang bisa dipetik - *lesson learned* -, yakni:

1. Eksistensi orang kuat partai menunjukkan kapasiatas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan, sementara partai yang demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam menentukan berbagai konteks kebijakan partai, karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai menjadi dilema tersendiri yakni : dilema posisi – orang yang menduduki posisi puncak di partai justru menjadi *toy of elite* dari orang kuat, dilema struktur – kolektifitas pengaturan partai dirubah menjadi otoritas individual orang kuat partai, dilema personalisasi institusi –

¹²Jainuri, “Orang Kuat Partai Di Aras Lokal : *Blater Versus Lora* Dalam Percaturan Politik”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas FISIPOL Brawijaya Malang, 2005.

partai seperti miliknya sendiri karena itu pengaturan mekanisme partai diatur sesuai dengan kehendaknya sendiri;

2. Dalam konteks kekuasaan keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat membatasi sekaligus juga mereduksi berlakunya aturan partai dalam pengaturan dinamika internal partai di aras lokal;
3. Kerekatan relasi didasarkan atas hubungan saling memanfaatkan dan mengekspresikan kepentingan yang sama antara orang kuat *blater* bersama oligarki partai tercipta pola hubungan *patron - client* . Dan untuk itu mereka sukses dalam berbagai konteks kekuasaan di DPD PAN kota Malang, misal: Berhasil mengintrodusir kepemimpinan presidium untuk mengeliminasi kepemimpinan DPD yang absah; Sukses mengamankan pencalegan dengan menempatkan orang dari lingkaran mereka untuk posisi sekretaris PPD II sebagai penyelenggara Pemilu di kota Malang; Berhasil menempatkan empat orang dekatnya untuk jadi anggota parlemen lokal di kota Malang tahun 1999 – 2004; dan Sukses menyelenggarakan Musyda PAN I tahun 2000 dan menguasai partai;
4. Berbeda dengan orang kuat *blater* yang mengekspresikan kekuasaan dengan jalan *natifisme*, orang kuat *lora* berhasil menguasai partai dan menghantarkan orang dekatnya menjadi anggota parlemen lokal tanpa jalan kekerasan, orangkuat partai ini justru mengintrodusir *nir* kekerasan selama ia bersama orang dekatnya mendominasi partai.

Peneliti kedua, karya Zikry Auliya dengan judul “Local Bossism: Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Komparatif”.¹³ Dalam penelitian ini di mana peneliti menemukan bahwa *Local bossism* telah menjadi gejala yang unik, yang menghinggapi negara dengan demokratisasi yang terhambat. Namun demikian perlu diberikan catatan kritis bahwa disetiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, antara di Filipina, Thailand dan Indonesia. Paling tidak ada beberapa perbandingan, antara local bossism yang muncul di Thailand dengan di Indonesia. *Pertama*, tesis Sidel bahwa local bossism tidak mungkin berkonvergensi dan bersimbiosis dengan dinasti politik terbukti *untenable*, pada dua negara menunjukkan bahwa dinasti politik telah tumbuh subur beberapa tahun setelah penelitian seminal Sidel memperoleh popularitasnya dalam studi Asia Tenggara.

Kedua, berbeda dari pola genealogi yang terjadi di Thailand, bahwa *chao pho* berdiri sebagai *middlemen* atau perantara independen antara Ibukota dengan daerah, pada kasus Indonesia, embrio bos lokal terbentuk dari *erzats capitalism*, kapitalisme semu yang bergantung pada negara, yang memperoleh bentuknya yang sempurna ketika memperoleh bentuknya yang sempurna sebagai kapitalis murni. Ketiga, perbedaan antara *chao pho* dengan bos lokal di Indonesia terletak pada derajat penggunaan senjata api. Persebaran senjata api di Thailand cukup lebih mudah secara umum, dibandingkan yang terjadi di Indonesia. Keempat, saya sepakat dengan Sidel bahwa keduanya sama-sama tumbuh dan bergantung pada sumber daya negara di bawah rezim otoritarian.

¹³Zikry Auliya, “*Local Bossism: Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Komparatif*”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa naiknya para bos ke puncak kekuasaan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik yang ada pada rezim otoritarianisme pembangunan rente kedua negara. Kelima, jika posisi militer kurang memperoleh posisi yang signifikan dalam jejaring *chao pho* di Thailand (paling tidak berdasarkan berbagai temuan yang saya temukan), sementara pada kasus Indonesia militer atau eks pejabat militer memegang peranan penting dalam penguatan, sebagai partner local bossism, ataupun bossism bagi dirinya sendiri. Dan terakhir, jika *chao pho* lebih memilih untuk bersikap *low profile* dalam jejaring patronase, hal yang sebaliknya, jika mengacu pada pengalaman Banten bos lokal cenderung ingin mengukuhkan posisinya dalam politik lokal dengan menjadi sorotan utama media.

Peneliti Ketiga, yang dilakukan oleh Richard Robinson dan Vedi R Hadis, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy In an Age of Markets*.¹⁴ Politik lokal pasca Soeharto ditemukan kecenderungan reorganisasi kekuasaan dari kelompok oligarki, yang menguasai jaringan sosial ekonomi dan politik lokal untuk kepentingan mereka sendiri.

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Dwipayana, memperlihatkan bahwa politik lokal pasca Soeharto ditandai dengan bangkitnya kembali entitas politik masa lalu (*Karaton, Fetor, dan Karaeng*) serta semakin dominannya peranan *Local Boss, the big man* (orang besar) dalam interaksi ekonomi-politik lokal.¹⁵

¹⁴Richard Robinson dan Vedi R Hadis, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy In an Age of Markets*, (New York: Rutledge Curzon, 2004)

¹⁵Ari Dwipayana, *Teori Politik*, (Yogyakarta: PLOD-UGM, 2005)

Kelima, penelitian tentang potret buram tentang dinamika politik lokal yang dicermati oleh Okamoto Masaaki dan teman-temannya dengan judul, *Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era Reformasi*.¹⁶ Dalam penelitian ini mereka mencermati proses demokrasi di ranah lokal melalui politik desentralisasi dan otonomi daerah, ternyata demokratisasi di level daerah ini banyak di manfaatkan oleh bos-bos lokal untuk merengkuh kekuasaan dengan cara-cara *natifism*, seperti penggunaan sentimen etnik melalui kehadiran mesin-mesin kekerasan di dalam ruang publik, seperti: *Broker* keamanan di Jakarta; *Jagoan* Betawi, *Jawara* di Banten, *Blater* di Madura, *Pecalang* di Bali dan lain-lain. Fenomena orang kuat dan boss-boss lokal yang merengkuh dan menjalankan kekuasaan dengan jalan *natifism* juga merambah partai politik seperti elaborasi dan studi elite lokal.

Keenam, penelitian Andi Rahman Alamsyah, dengan judul “*Islam, Jawara dan Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru*”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan kemunculan “orang kuat lokal” di Banten dari kelompok jawara sebagai penguasa Banten Pasca Orde Baru. Para jawara yang dipimpin seorang “orang kuat lokal” menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik mereka dalam setiap pertarungan politik elektoral. Elit-elit jawara banyak yang menduduki jabatan strategis yang memberikan keuntungan secara ekonomi dan politik kepada kelompok Jawara.

¹⁶Okamoto Masaaki (Ed), *Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era Reformasi*, (Yogyakarta: IRE Press, 2006)

¹⁷Andi Rahman Alamsyah, *Islam, Jawara dan Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2009), hlm 64.

Ketujuh, Disertasi Lili Romli tentang “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)”.¹⁸ Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa kelompok jawara di Banten berpengaruh dalam kemenangan Gubernur Banten di era desentralisasi. Mereka memenangkan anak tokoh besar jawara Banten menjadi Wakil Gubernur Banten dan kemudian menjadi Gubernur Banten. Kelompok ini juga memiliki pengaruh yang kuat dalam perpolitikan lokal di Banten.

Kedelapan, penelitian Nankyung Choi menjelaskan kemunculan “orang kuat lokal” di Kota Batam. Ahmad Dahlan, putra asli melayu, berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan Walikota Batam. Keberhasilan Ahmad Dahlan ditentukan oleh kemampuannya menggunakan Laskar Hulubalang Putih, sebuah milisi etnis melayu dengan anggota sekitar 10.000 orang dalam memengaruhi rakyat Batam. Di samping menggunakan milisi, Ahmad Dahlan didukung penuh oleh Forum 70, sebuah kelompok elit pebisnis. Ahmad Dahlan mampu menggalang dukungan rakyat melalui kombinasi sentimen-sentimen kultural dan kepentingan ekonomi.¹⁹

Kesepuluh penelitian Jacqueline Vel yang meneliti pertarungan dua “orang kuat lokal” di Sumba Timur. Keduanya yakni Umbu Mehang Kunda dan Lukas Kaborang merupakan elit lama yang dibesarkan oleh Golongan Karya sebagai kekuatan utama kekuasaan Orde Baru. Mereka bertarung

¹⁸Lili Romli, “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)”, *Disertasi Doktor*, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 2007.

¹⁹Nankyung Choi, *Indonesia’s Direct Local Elections : Background and Institutional Framework*, (Singapore: Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper, 2007), hlm 343.

memperebutkan kekuasaan dalam konteks politik yang lebih terbuka dan demokratis. Masing-masing menggunakan simbol-simbol kultural dan keagamaan dalam memobilisasi dukungan rakyat untuk menjadi Bupati Sumba Timur tahun 2005.²⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Lokal Boses

Ada dua kerangka teoritik yang sering digunakan untuk menjelaskan fenomena kemunculan *local strongmen* dalam istilah Migdal atau *Bossism* menurut Sidel. Menurut Migdal, setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai pemimpin, di mana pemimpin itu relatif otonom dari negara. Setiap masyarakat memiliki *social capacity* yang memungkinkan mereka menerapkan aturan main mereka sendiri tanpa diintervensi oleh negara. Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemah (*weak state*), maka para *strongmen* menapak kekuasaannya dalam *level* lokal.²¹ Migdal, menyebutkan strategi *triangle of accommodation* sebagai strategi *strongmen* untuk bertahan. Dengan demikian, Kehadiran *strongmen* merupakan refleksi dari kuatnya masyarakat. Migdal mengemukakan *local strongmen* bisa sukses karena pengaruh mereka dan bukan aturan resmi yang dibuat: "why *local strongmen* have, through their success at social control often effectively captured parts of third world states". Mereka sukses dalam

²⁰Jacqueline Vel, "Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic Setting", dalam *Indonesia* Nomor 80 Oktober 2005, hlm 94.

²¹Joel Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, hlm. 256

menguasai posisi-posisi penting dan memastikan alokasi sumber daya karena pengaruh mereka (*own rules*), dan bukan karena aturan yang secara resmi dibuat.

Paling tidak ada tiga argumen yang menjelaskan fenomena keberhasilan orang kuat lokal menurut Migdal:

- a. *Local strongmen* telah mengembangkan '*weblike societies*' melalui organisasi otonom yang dimiliki, dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial.
- b. *Local strongmen* melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut '*strategies of survival*' dari masyarakat lokal. Ini menghasilkan pola personalism, clientalism, dan relasi patron – client.
- c. *Local strongmen* menguasai *state agency* dan sumber daya, sehingga agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentingan *local strongmen*. *Local strongmen* melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara, dan berhasil melemahkan negara dalam proses pencapaian tujuan perubahan sosial.²²

Berbeda dengan Migdal, berdasarkan studinya tentang elite lokal di Philipina, Sidel mengatakan bahwa konsep *bossism* merujuk pada: “*predatory power brokers who achieve monopolistic control over both coercive and economic resources within give territorial jurisdictions or bailiwicks*”. Faktor yang menjamin keberlangsungan *bossism* di Philipina, yakni: Struktur institusi negara; Konsentrasi modal swasta di daerah sebagai

²²*Ibid*, hlm. 238-258

bagian kebijakan negara; Warisan Amerika berupa sistem pemilu Philipina; Keikutsertaan aparat negara pada masa-masa awal *capitalist development*.²³

Sidel berkesimpulan bahwa eksistensi dan keberlangsungan bos merupakan refleksi kekuatan negara. Hal ini berlawanan dengan tesis Migdal “*strong societies and weak states*”. Orang kuat lokal melanggengkan kekuasaannya dengan cara-cara berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, melakukan *stationary bandit* dan *roving bandit* (kriminalitas).

Migdal menyatakan bahwa *local strongmen* dapat bertahan asalkan ia berkolaborasi dengan negara dan partai politik pemerintah, berdasar hal tersebut maka terbentuklah “*triangle of accomodation*”. Ironisnya *triangle* ini mengijinkan sumber daya negara untuk memperkuat *local strongmen* dan organisasinya yang mengatur *the game conflict*.²⁴ Lebih lanjut Migdal mengemukakan bahwa keberlangsungan *local strongmen* juga tergantung pada kekuatan negara untuk mengatur kontrol mereka; mereka belajar mengakomodasi pemimpin yang populis untuk menangkap organisasi negara pada level yang lebih rendah.

Sementara Sidel menyatakan, penggunaan *coercive violence* merupakan strategi yang digunakan para bos di Philipina untuk bertahan. Mancur Olson dalam bukunya *Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorship* yang dikutip Antonius Made Tony

²³John T. Sidel, “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia”, dalam John Harriss dkk., (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, hlm. 94

²⁴Joel Migdal *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, hlm. 256.

Supriatma menyatakan *stationary bandit* dan *roving bandit* sebagai strategi bertahan *local strongmen*.²⁵ Istilah tersebut merupakan metafor tindakan kriminalitas yang ia gunakan menganalisa logika kekuasaan dan relasinya dengan kesejahteraan. *Roving bandit* merampok sebanyak yang ia bisa dan tidak meninggalkan apapun pada masyarakat. Menurut Olson yang dikutip Antonius Made Tony Supriatma, *roving bandit* akan menciptakan kemiskinan dan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Sidel pada tulisan berikutnya melanjutkan analisis tentang *local strongmen* dengan membandingkan kasus di negara Philipina, Thailand dan Indonesia. Di Indonesia *local strongmen* dengan *setting* fenomena pemilihan kepala daerah yang melibatkan: politik uang, premanisme, keterlibatan kelompok ekonomi kuat dan keterlibatan kelompok preman. Menurut Sidel pada jaman orde baru *local strongmen* di ilustrasikan sebagai berikut :

- a. Konteks pergeseran dari sentralisme kekuasaan ke desentralisasi kekuasaan, berpindahnya kekuasaan “*dari satu Soeharto ke banyak Soeharto?*”;
- b. Orde Baru yang monolitik telah melimitasi munculnya *Local Strongmen*, karena semua saluran ke arah kekuasaan ada di satu pintu : Rejim Orde Baru (Suharto, Golkar, dan AD);
- c. Adalah karena organisasi kuasa negara dengan pola sentralistis yang membuat *local strongmen* tidak muncul, dan bukan masyarakat jika pola

²⁵ Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos“, hlm. 90.

organisasi kuasa muncul, maka *local strongmen* akan tumbuh. Singkatnya sangat terpusat dan watak dasar otoriter negara zaman Soeharto tidak memungkinkan bagi para "bos lokal" untuk bermunculan, bertahan hidup, dan tumbuh subur di Indonesia hingga menjelang pergantian abad; dan

- d. Orde Baru juga memfasilitasi munculnya elite lokal antara lain: Pensiunan tentara yang menduduki pos-pos lokal; elite lokal yang mendapatkan kewenangan kontrol dari negara atas sumber daya ekonomi tertentu (*state lands allocation*); anggota DPRD lokal; dan kepala-kepala desa. Transisi demokrasi pada tahun 1999 makin memperlebar kemungkinan akumulasi kekuasaan *local strongmen* oleh mafia, jaringan marga di lokalitas seluruh Nusantara.²⁶

Menurut Sidel kondisi-kondisi ini kurang lebih sama dengan di Philipina dan Thailand yang diidentifikasi Sidel sebagai berikut :

- a. Kompetisi politik yang terbuka di level lokal telah membuka peluang akumulasi kekuasaan di tangan mafia lokal, jaringan, dan klan,
- b. Kasus Sumatera Utara : 1) Aktor politik penting berasal dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang hidupnya tergantung dari proyek pemerintah; 2) politisi profesional yang memiliki jaringan dengan partai politik orde baru; 3). Aktifis organisasi mahasiswa/pemuda yg selama ini menjadi *supplier* birokrasi Orde baru; 4). Dari 22 bupati/ walikota, 6 adalah pebisnis – berupaya melakukan kontrol atas *state apparatus*;

²⁶John T. Sidel, "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia", dalam John Harriss dkk., (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, hlm. 104-103

- c. Kasus Aceh: 1). Mafia kayu lokal yang memiliki pengaruh kuat di birokrasi dan lembaga perwakilan; 2) Melalui jaringan pengaruh ini, mafia kayu memastikan pejabat lokal yang terpilih tidak mengancam bisnis mereka; 3). Jaringan yang terbentuk meliputi; bupati, polres dan kodim, pejabat lokal dan imam;
- d. Kasus Medan: 1) Penguasaan DPRD oleh kelompok preman yang berkompetisi; 2) mereka memiliki jaringan dengan pensiunan tentara dan polisi; 3) Walikota adalah pebisnis yang menang terutama melalui pembelian suara dan ancaman.²⁷

2. *Bossisme* di Indonesia : Naiknya sebuah Konsep

Bossisme di Indonesia memiliki sejarah yang cukup berbeda dengan negara-negara tetangganya, seperti Thailand, Malaysia, Philipina dan sebagainya. Sidel melacak sejarah munculnya *bossisme* sejak suksesi politik Sukarno ke Suharto. Dengan berdirinya rezim otoritarian Suharto, perekonomian mulai dipulihkan melalui berbagai pinjaman, termasuk bantuan dan dukungan dari kelompok ekonom neo-klasik FEUI yang menjadi arsitek Orde Baru, yang tergabung di dalamnya Prof. Widjojo Nitisastro.²⁸

Dengan didukung oleh perspektif Huntingtonian yang kuat mempengaruhi berbagai rezim pembangunan di dunia, Orde Baru berusaha mengukuhkan posisinya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁸ Howard Dick. et.al, *The Emergence of National Economy: an Economic History of Indonesia 1800-2000*. Hawai'i : University of Hawaii Press, 2002. hlm. 196

melalui penguatan lembaga politik untuk menciptakan stabilitas demi kelancaran pembangunan.²⁹ Demi kelancaran pembangunan, intervensi militer dalam politik bukan menjadi persoalan, termasuk diantaranya pemangkasan partai melalui kebijakan fusi partai pada tahun 1973. Selain pembungkaman aspirasi politik, penting bagi Orde Baru untuk menempatkan berbagai personel militernya di berbagai penjuru daerah untuk menciptakan stabilitas, sekaligus sebagai agen pembangunan hingga ke desa-desa. Segala pertanggung jawaban atas pejabat lokal maupun personel militer yang ditempatkan di daerah langsung bertanggung jawab pada pusat, pimpinan di atas yang tidak lain adalah Suharto. Selain itu pemberlakuan rotasi bagi para pejabat lokal seperti gubernur ataupun pejabat militer di tingkat lokal menjadi penting, karena tindakan ini mampu mencegah aktor semacam ini untuk membuat sejenis kerajaan kecil. Kondisi ini, bagaimanapun juga berhasil membatasi naiknya *bossisme* ke permukaan pada era Orde Baru.

Namun demikian, kondisi yang terbatas ini, dalam artian bahwa segala keputusan dan monitor berada di tingkat pusat bukan berarti meninggalkan sedikit kemungkinan bagi pejabat lokal seperti gubernur untuk bertindak atas diskresinya sendiri atas nama perintah pusat seperti pemberian lisensi dan izin bagi perusahaan kontraktor, pertambangan, logging, yang pada gilirannya memungkinkan pejabat lokal semacam ini untuk memperoleh

²⁹Vedi R Hadiz, *The Rise of neo-Third Worldism? The Indonesian Trajectory and Consolidation of Liberal Democracy*. 3rd World Quarterly, vol 25, No 1, pp 55-71. 2004. hlm. 59

keuntungan dari aktifitas *rent-seeking*. Pemerintahan yang sentralistik juga memberikan celah bagi para aktor tertentu, khususnya pensiunan pejabat militer yang diuntungkan, untuk membentuk sebuah basis kekuatan di tingkat lokal melalui pembuatan bisnis yang didukung oleh negara.³⁰

Bisnis ini biasanya melibatkan unsur monopoli dalam tingkat lokal, dan yang umumnya terjadi, *racketeering* atau *protection racket*.³¹ Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti saling membantu dengan aliansi lokal, seperti menikah atau menikahkan anaknya dengan penduduk setempat, menjadikan penduduk lokal partner bisnis ataupun memanipulasi pejabat militer baru yang belum berpengalaman. Namun penting untuk dicatat bahwa mafia lokal ini tidak terbatas pada kalangan militer.³²

Pada dekade 1970 telah terjadi transformasi di kalangan pejabat publik seperti Ketua DPRD, Sekwilda dan Bupati yang berubah dalam waktu singkat menjadi pemilik perusahaan plantasi, pembudidayaan ikan, pabrik semen, penebangan hutan, perbankan, perusahaan konstruksi, hotel dan resort bagi para turis sebagai dampak yang luar biasa dari oil boom.³³

³⁰Damien Kingsbury, *Power Politics and The Indonesian Military*. (London: Routledge Curzon, 2003), hlm. 87. Lihat Chapter 5 *The Political Economy of the Military*, hlm. 192

³¹Lebih jauh mengenai perlindungan dan bisnis ilegal dapat dilihat dalam Ian Wilson, "Reconfiguring Rackets Racket Regimes, Protection and the State in Post-New Order Jakarta" dalam Edward Aspinall and Gerry Van Klinken, *The State and Illegality in Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2011), hlm. 121.

³²John T. Sidel, "Bossism in Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework of Local Strongmen" dalam John Harriss, *Kristian Stokke and Olle Tornquist, Politicising Democracy : The New Local Politics of Democratization*. (New York : Palgrave Macmillan, 2005). hlm. 63

³³Richard Robison adalah pengamat yang cukup paham dalam mengamati transformasi yang demikian cepat dari pejabat rent-seeking atau *erzats capitalism* berubah menjadi kapitalisme murni lihat Andrew MacIntyre, "Business and Politics in Indonesia", Chapter 1, (Australia: Allen & Unwin, 1992), hlm. 6-21

Tentu saja, pengaruh kekuasaan bos perlu diperluas dengan terdapatnya organisasi para militer baik untuk melindungi bisnis atau menghancurkan rival bisnis ataupun untuk memobilisasi suara bagi rezim yang berkuasa, pada konteks inilah peran dari Pemuda Pancasila perlu diletakkan. Dengan terbukanya partisipasi politik di tingkat lokal melalui desentralisasi, semakin memudahkan jalan bagi berbagai bos lokal untuk memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada. *By hook or by crook*, aktor predatoris berusaha untuk memperkuat posisinya dalam aktifitas *rent seeking* atau akumulasi modal primitif, termasuk dengan cara kekerasan melalui premanisme. Dasar inilah yang menjadi banyak penyebab dari kerusakan bangunan, pembakaran gedung dan dokumen menyusul kekalahan kandidat, baik dalam pemilu legeslatif maupun pemilu Kepala Daerah di banyak tempat di Indonesia.³⁴

3. Teori Hegemoni Gramsci

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam catatannya terhadap karya Machiavelli, *the Prince* (Sang penguasa), Gramsci menggunakan *centaur* mitologi Yunani, yaitu setengah binatang dan setengah manusia, sebagai simbol dari ‘perspektif ganda’ suatu tindakan politik kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan

³⁴Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. (Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHam, 2006), hlm. 63

hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.³⁵

Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam beberapa pragraf dari karya *Prison Notebooks*, Gramsci menggunakan kata *direczione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione* (dominasi). Penggunaan kata hegemoni dalam pengertian Gramsci harus dibedakan dari makna asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain. (Ada beberapa bagian dalam *Prison Notebooks* dimana Gramsci menggunakan hegemoni dalam pengertiannya yang umum, yaitu penguasaan antarbangsa antara kota dan desa).

Gramsci di sini mengartikan hegemoni berbeda dengan pengertian secara umumnya, ia melihat di tempat tinggalnya terjadi dominasi besar-besaran di mana pemerintah menggunakan kekerasan konsensus pemerintah dengan rakyatnya dan munculah hegemoni sebagaimana konsep hegemoni Gramsci muncul.³⁶

Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan dari mayoritas. Gramsci menambahkan dimensi baru pada masalah ini dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik

³⁵ Roger Simon, *Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. ix.

³⁶ *Ibid.*

dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan mengenai sejarah Italia.³⁷

Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan “dominasi,” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik. Tentu saja teori hegemoni bukanlah barang baru dalam tradisi Marxis.³⁸

Jadi Gramsci mengubah makna hegemoni dari strategi (sebagaimana menurut Lenin) menjadi sebuah konsep yang seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana untuk memahami masyarakat dengan tujuan mengubahnya, ia mengembangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara kedalam konsepnya tentang hegemoni. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan

³⁷*Ibid.*, hlm. xx

³⁸*Ibid.*

sosial lain. Kelas hegemonik, atau kelompok kelas hegemonik, adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Konsep ideologis dibangun dengan memasukkan beberapa konsep lain yang berkaitan dengannya. Itulah sebabnya mengapa definisi yang singkat mengenai hegemoni tidak pernah memadai.³⁹

Fakta bahwa teori hegemoni bahwa teori Gramsci memberikan banyak tekanan pada sentralitas konsensus dan bukan pada kekuatan serta bahwa konsensus dan bukan pada kekuatan serta bahwa konsensus itu merupakan “salah satu syarat pokok untuk meraih kekuasaan” sudah terang memberikan peran yang sangat signifikan pada intelektual organik. Hal ini tampak jelas dalam konsepsinya tentang jalan menuju sosialisme. Meminjam istilah militer, Gramsci mendiferensiasikan dua perbedaan strategis bagi sosialisme “perang gerakan” atau “perang manuver” dan “perang posisi”.

Dalam konsepsinya tentang perang gerakan, Gramsci menunjuk pada strategi revolusioner Marxis-Leninis dalam memperjuangkan sosialisme. Strategi cocok dengan anggapan Marxisme ortodoks tentang sentralitas kekuatan dalam sebuah tantangan sosial. Strategi ini bersandar sepenuhnya pada kekerasan partai revolusioner untuk menyerang balik apa yang dipandang sebagai kekerasan negara borjuasi. Kebangkitan proletariat menuju kekuasaan bisa dipandang sebagai manifestasi dan strategi ini, yaitu

³⁹Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 21.

semata-mata mengganti kekuasaan koersif negara. Dalam pandangan Gramsci, bagaimanapun juga, perang gerakan hanya bisa ditepakan dalam kondisi khusus, yaitu di “Negara modern”.⁴⁰

Dalam menganalisis perang posisi yang berlangsung antara dua kelas utama untuk meraih hegemoni, Gramsci melakukan perbedaan tegas antara strategi yang ditepakan kelas pekerja. Strategis kaum borjuis mempunyai sifat khusus yang dinamakan revolusi pasif (*passive revolution*). Ia mengembangkan konsep ini dari analisisnya terhadap *risorgimento*, gerakan untuk menyatukan Italia pada pertengahan abad ke-18. Walaupun ada sejumlah pemberontakan rakyat dalam gerakan *Risorgimento*, penyatuan nasional Italia (termasuk pengusiran bangsa Austria) dan bangkitnya kekuasaan kaum kapitalis di Italia Utara pada saat yang bersamaan, berhasil mewujudkan terutama melalui agen negara, tentara dan kerajaan Piedmont, bukan dengan memobilisasi mayoritas penduduk atau mendukung tuntutan pembaruan agraria kaum tani. Jadi, *Risorgimento* merupakan ‘revolusi dari atas’, ditimbulkan melalui agen negara *Piedmont*. Ia merupakan suatu revolusi pasif.

Hegemoni yang begitu besar membuat kaum kelas bawah tidak bisa berbuat apa-apa bukan hanya hegemoni lewat kekuasaan fisik namun dengan dimasukkannya ideologi-ideologi baru sehingga proses dominasi semakin besar. Kelas yang lebih rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan untuk memperoleh

⁴⁰*Ibid.*

dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelas yang lebih rendah harus mulai melampaui aktifitas korporasi dalam lingkup setempat, yaitu aktifitas ketika mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri yang bersifat sesaat, dan harus bergerak maju menuju fase hegemonik dengan memperhatikan juga kepentingan kelas kelompok lain. Hubungan antara dua kelas utama, feodal dan kapitalis, atau kapitalis dan kelas pekerja, bukan merupakan suatu hubungan oposisi yang sederhana antara dua kelas, tetapi merupakan ancaman dari beberapa hubungan yang rumit dan melibatkan berbagai kelas kelompok dan kekuasaan sosial yang lain.

Sejauh ini Gramsci hanya memberikan definisi Marxis klasik terhadap lahinya sebuah kelas. Sumbangannya yang nyata terlihat pada analisisnya mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Ia mengambil contoh munculnya kelas kapitalis, dan membedakan tiga fase perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase yang pertama adalah fase ekonomi-korporasi (sering singkat korporasi), sedang ketiga adalah fase hegemonik, berikut uraiannya:

- a. Fase pertama dan paling awal terjadi ketika seorang pedagang merasa perlu berdiri sejajar dengan pedagang lain, seorang pengusaha dengan penguasa yang lain, dan lain sebagainya ; namun pedagang belum merasakan timbulnya solidaritas dari pengusaha. Anggota kelompok profesional sadar akan kepentingan bersama mereka dan perlunya mereka bersatu, namun mereka belum menyadari kebutuhan untuk bergabung dengan kelompok lain ke dalam kelas yang sama.

- b. Fase kedua yang lebih maju adalah fase dimana telah tumbuh kesadaran akan kepentingan bersama semua kelas namun masih dalam bidang ekonomi. Pada tahapan ini masalah negara sudah diperhatikan, namun hanya sebatas untuk memperoleh persamaan politik dan hukum dengan kelompok yang berkuasa hak untuk ikut serta dalam peneetapan undang-undang dan adminstrasi, bahkan untuk mengubahnya memang dalam struktur dasar yanmg ada
- c. Fase ketiga adalah fase hegemoni “dimana orang menajdi sadar bahwa kepentingan perusahaannya dalam perkembangan dimasa sekarang dan mendatang, mellampui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi, dan kepentingan itu dapat harus menjadi kepentingan dari kelompok yang lebih rendah”. Ini adlah tahap yang murni politik, ini adalah fase dimana fase ideologi-ideologi yang sebelumnya terpecah-pecah sekarang bersaing sampai salah satunya, atau gabungan dari ideologi-ideologi itu, memang sehingga bisa menyatukan tujuan-tujuan ekonomi, politik, intelektual dan moral serta persoalan sehingga perjuangan tidak berlangsung dalam dataran korporasi namun dataran ‘universal’ yang pada akhirnya terciptalah hegemoni suatu kelompok sosial yang kuat terhadap kelompok lain yang lebih rendah.⁴¹

⁴¹Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 21.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet dan sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi pembahasan bos lokal dalam mendulang suara yang berasal dari berbagai sumber, kemudian menganalisis secara cermat dengan Konsep politik Islam guna memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui dasar pemikiran seseorang dari masa lalu dan sekarang yang mempengaruhi dimunculkannya gagasan tersebut, yang didasarkan konsep ilmu politik. Dalam usaha pemecahan masalah yang dikaji, penyusunan ini menggunakan pendekatan normatif, yakni mendekati konsep lokal bos di Indonesia dalam mendulang suara dengan mendasarkan pada aturan yang ada dalam politik di Indonesia dengan rujukan konsep yang ada, serta pendapat para pakar politik lewat karya tulis maupun informan langsung jika diperlukan, selama itu masih dalam bingkai politik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Sleman Yogyakarta, yang dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan Desember 2014

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan suatu teknik observasi terhadap aturan dan konsep Politik Islam, nas al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan normatif hukum Islam, literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan dan relevan dengan obyek penelitian ini.

Penelitian mengenai Fenomena “*Local Bosses* Sebagai Mesin Pendulang Suara (Studi di DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Sleman Dalam Pileg 2014)”, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Di samping wawancara mendalam dapat juga digunakan diskusi kelompok yang fokus (FGD) di kalangan pejabat DPC Gerindra Sleman dan anggota legeslatif terpilih sekaligus dijadikan informan. Wawancara mendalam adalah mendengarkan informan berbicara agar memperoleh suatu wawasan atau pandangan mereka tentang peran bos lokal di Pileg 2014 lalu wilayah Sleman dan bagaimana mereka memandang segala hal sebagaimana adanya.

Kategori narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Partai Politik Gerindra di DPC Sleman. Narasumber yang termasuk dalam kategori pertama ini adalah: Bapak HR. Sukaptono (Ketua DPC Gerindra Sleman), Bapak Husni Herianto (Wakil Ketua Harian DPC Gerindra Sleman), Bapak Sarjdito (Wakil Sekretaris DPC Gerindra Sleman), Muh. Arif Proyususanto (Sekretaris DPC Gerindra, sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sleman Dapil IV Sleman), dan Bapak Ahmad Shidqi selaku Ketua KPUD Kabupaten Sleman.

5. Analisis data

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk memperoleh langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat *induktif* yakni suatu proses berfikir yang mengangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus tentang pandangan lokal bosses dalam mendulang suara dalam pileg 2014 di Kabupaten Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap karya ilmiah tidak terlepas dari pembahasan, dalam rangka pembahasan agar dapat berurutan dan sistematis ditempatkan bab per bab sesuai tingkat urgensinya. Karena dengan demikian memudahkan perincian tujuan penyusun. Adapun skripsi ini memuat beberapa bab, yaitu:

Bab *Pertama* memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* yang memuat tentang tinjauan umum tentang lokal bores, yang isinya meliputi pembahasan definisi lokal bores, peran dan kekuasaan lokal bores.

Bab *Ketiga* berisi tentang Gambaran umum partai Gerindra, yang pembahasannya meliputi sejarah partai Gerindra, manifesto partai, jati diri, visi dan misi, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Sleman.

Bab *Keempat* merupakan bab analisa dari pembahasan dari lokal bores dalam mendulang suara. Pada pembahasan ini meliputi penyikapan tentang lokal bores dalam pendulangan suara pemilihan legeslatif di DPC Gerindra Sleman Yogyakarta.

Bab *Kelima* dalam skripsi ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan bos lokal di DPC Gerindra Sleman berangkat dari adanya pengusaha dan tentara. Eksistensi mereka menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan, termasuk di dalamnya pendulangan suara di kantong-kantong daerah pemilihan. Kolektif kolegalitas kepemimpinan dalam menentukan berbagai konteks kebijakan partai, karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai menjadi dilema tersendiri yakni : dilema posisi – orang yang menduduki posisi puncak di partai justru menjadi *toy of elite* dari orang kuat, dilema struktur – kolektifitas pengaturan partai dirubah menjadi otoritas individual orang kuat partai, dilema personalisasi institusi – partai seperti miliknya sendiri karena itu pengaturan mekanisme partai diatur sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Orang kuat lokal merupakan bagian dari elit lokal yang dibesarkan secara ekonomi dan politik masa Orde Baru. “Orang kuat lokal” mempunyai akses politik yang besar karena merupakan aktor politisi dan mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi di tingkat lokal karena merupakan pengusaha lokal yang bergabung dalam Gapensi. Orang kuat lokal mempunyai mesin politik modern berupa jaringan kekuasaan dengan inti sebuah keluarga politik yang besar dan mempunyai sejarah panjang di tingkat lokal. Orang kuat lokal

menempatkan keluarganya tersebut dalam jabatan-jabatan yang strategis baik di pemerintahan maupun partai politik. Orang kuat lokal juga membangun simbol-simbol kebesaran keluarga politik mereka dan citra diri sebagai keluarga politik yang kaya raya dan dermawan serta tidak punya kepentingan menambah kekayaan. Mesin politik modern yang berintikan sebuah keluarga politik yang besar dan mempunyai sejarah panjang di tingkat lokal juga ditunjang oleh berbagai lingkaran kekuasaan yang dibangunnya. Lingkaran kekuasaan ini terdiri dari politisi lokal, birokrat lokal, aktivis LSM lokal, aktivis ormas, jurnalis lokal dan aktivis mahasiswa dan pemuda.

Kekuatan reformasi di tingkat lokal dalam bentuk gerakan sosial yang kuat tidak bisa berkonsolidasi dan bersatu sebagai kekuatan politik alternatif. Kelompok ini yang sebelumnya aktif mendorong perubahan politik tidak memiliki kesiapan dalam mengisi kekuasaan politik yang ditinggalkan kelompok otoriter di tingkat lokal. Mereka dalam kondisi yang lemah dan terpecah serta memiliki berbagai keterbatasan. Orang kuat lokal menjadi kelompok yang paling siap beradaptasi dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Sistem yang mereka maknai sebagai pergeseran aturan main dari penunjukan langsung Orde Baru menjadi penggunaan politik uang dan sedikit intimidasi dalam memobilisasi dukungan dalam pendulangan suara. Mereka juga mampu bertransformasi menjadi bagian dari kelompok reformis melalui jabatan di tingkat lokal.

Muncul elit lokal atau bos lokal di Sleman era desentralisasi. Sebab di samping besarnya pengaruh yang mereka berikan kepada parta, mereka juga

masih merupakan keturunan langsung dari pengusaha yang berdarah biru (kerajaan). Di samping itu tidak saja mewarisi kekayaan, tetapi juga dengan basis politik yang kuat dan solid. Oleh karena itu mereka berhasil membangun citra diri dan kader partai yang dermawan, merakyat dan reformis. Melalui kekayaan, citra diri dan basis politik yang kuat, Gerindra dapat mendulang suara yang banyak dan memenangkan Pileg 2014 lalu dengan mendudukkan 7 Anggota legislatifnya. Kader Gerindra juga berhasil menjadi Wakil Ketua DPRD Sleman dan terpilih menjadi Ketua KMP Sleman..

Bos lokal di Gerindra memiliki pengaruh yang besar dalam memengaruhi politik lokal dalam pendulangan suara pemilih. Pengaruh tersebut diukur dari empat indikator, yaitu melakukan kontrol atas masyarakat; dan mendapatkan dukungan dari organisasi militan. Kedua indikator tersebut tidak lepas dari pengaruh bos lokal yang terdiri dari pengusaha dan militer, sehingga Gerindra berhasil mendominasi suara di Dapil Sleman 2014 yang lalu.

B. Saran-Saran

1. Setelah rakyat memberikan suaranya, setidaknya anggota-anggota legeslatif yang telah dipilih rakyat memperjuangkan dan melayani kepentingan rakyat, bukan melayani kepentingan bos lokal, meskipun ada indikasi karena bos lokal yang membiayai kegiatan-kegiatan Parpol. Selama ini Parpol bangsa ini ini jauh dari rakyat. Parpol dekat dengan rakyat ketika Pemilu, saat Pemilu usai Parpol dekat dengan orang yang membiayainya. Jadi ada ketergantungan terhadap modal, para pedagang, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Buku

- Abinales, Patricio N., *Making Mindanao : Cotabato and Davao in the Formation of Philippine Nation-State*, Manila : Ateneo De Manila University Press, 2004.
- Alamsyah, Andi Rahman Islam, *Jawara dan Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2009
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Singapura : ISEAS, 2010.
- Ayoade, John A.A., "Godfather Politics in Nigeria", dalam IFES Nigeria, *Money and Politics in Nigeria*, Abuja: Petra Press, 2008.
- Bourchier, David, dan Vedi R. Hadiz (eds), *Indonesian Politics and Society : A Reader*, London : RoutledgeCurzon, 2003.
- Bunte, Marco, dan Andreas Ufen (eds), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London : Routledge, 2009.
- Case, William, *Politics in Southeast Asia : Democracy or Less*, Surrey: Routledge Curzon, 2002
- Choi, Nankyung, "Indonesia's Direct Local Elections: Background and Institutional Framework", Singapore: Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper, 2007
- Dick, Howard, et.al, *The Emergence of National Economy: an Economic History of Indonesia 1800-2000*. Hawai'i : University of Hawaii Press, 2002.
- Dwipayana, Ari, *Teori Politik*, Yogyakarta: PLOD-UGM, 2005.
- Grindle, Merilee S., *Going Local : Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance*, Princeton : Princeton University Press, 2007
- Hafiz, Vedi R, *The Rise of neo-Third Worldism? The Indonesian Trajectory and Consolidation of Liberal Democracy*. 3rd World Quarterly, vol 25, No 1, pp 55-71. 2004.
- ., *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.
- ., *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Hedman, Eva-Lotta E., *Philippine Politics and Society in the 20th Century : Colonial Legacies, Post-Colonial Trajectories*, London: Routledge, 2000

- Hidayat, Syarif, "Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten", dalam Henk Schulte dan Gerry van Klinken (Ed.), *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Jainuri, "Orang Kuat Partai Di Aras Lokal : Blater Versus Lora Dalam Percaturan Politik", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas FISIPOL Brawijaya Malang, 2005.
- Kawanaka, Takeshi, "The Robredo Style : The Philippine Local Politics in Transitions", dalam *Kasarinlan, A Philippine Quarterly of Third World Studies*, Volume 13 Nomor 3 Tahun 1998.
- Kingsbury, Damien, *Power Politics and The Indonesian Military*. London: Routledge Curzon, 2003. Chapter 5 The Political Economy of the Military.
- Kothari, Rajni, "Issues in Decentralized Governance", dalam S.N. Jha dan P.C. Mathur (eds), *Decentralization and Local Politics*, New Delhi : Sage Publications, 1999.
- MacIntyre, Andrew, *Business and Politics in Indonesia*. Australia: Allen & Unwin, 1992.
- Marijan, Kacung, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHam, 2006.
- Masaaki, Okamoto (Ed), *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta: IRE Press, 2006.
- McCoy, Alfred W., *An Anarchy of Families : State and Family in the Philippines*, Wisconsin : The University of Wisconsin University Press, 2009.
- McGlinchey, Eric, *Chaos, Violence and Dynasty: Politics and Islam in Central Asia*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2011.
- Migdal, Joel S., *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton: Princeton University Press, 1988.
- Mubarok, Ahmad Husni, "Pilkada dan Shadow State", dalam Gregorius Sahdan dkk., (Ed), *Negara Dalam Pilkada Dari Collapse State ke Weak State*, Yogyakarta: IPD Press, 2008.
- Nordholt, Henk Schulte, "Decentralization in Indonesia: Less State, More Democracy?", dalam John Harriss dkk., (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta: Demos. 2005.
- Reno, William, *Warlord Politics and African States*, London : Lynne Rienner, 1998.
- Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London : Routledge, 2004.

- Romli, Lili, "Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)", *Disertasi Doktor*, Tidak diterbitkan, Universitas Indonesia, 2007.
- Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting : Indonesia's Search for Stability*, New South Wales: Allen & Uwin, 2001.
- Sidel, John T., "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailan dan Indonesia", dalam John Harriss dkk., (Ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta: Demos. 2005.
- Trocki, Carl A. (ed), *Gangsters, Democracy and The State in Southeast Asia*, New York : Cornell Southeast Asian Program Publications, 2003
- Wilson, Ian, "Reconfiguring rackets Racket regimes, protection and the state in post-New Order Jakarta" dalam Edward Aspinall and Gerry Van Klinken, *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2011.

2. Kelompok Lain-lain

- Anderson, Benedict, "Cacique Democracy in the Philippines: Origins and Dreams", dalam *New Left Review* No. 169 Bulan Mei-Juni 1988
- Anonim, *Arsip Profil Partai Gerindra*, DPC Sleman, 2007
- Carothers, Thomas, "The 'Sequencing' Fallacy", *Journal of Democracy*, Vol. 18, No. 1, January, 2007.
- Giustozzi, Antonio, dan Noor Ullah, "The Inverted Cycle: Kabul and the Strongmen's Competition for Control Over Kandahar 2001-2006", dalam *Central Asian Survey* Volume 26 Nomor 2 Juni 2007.
- Hafiz, Vedi R, dan Richard Robison, "Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations: The Indonesian Paradox", dalam *Journal of Development Studies* Volume 41 Nomor 2 Bulan Februari 2005.
- Hendri Lendang, "Sejarah Partai Gerindra", dalam <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra#sthash.ve9Kj9q0.dpuf>., diakses tanggal 12 November 2014
- Hendri Lendang, "Sejarah Partai Gerindra", dalam <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra#sthash.ve9Kj9q0.dpuf>., diakses tanggal 12 November 2014
- Mukhopadhyay, Dipali, "Warlord as Bureaucrat: The Afghan Experience", dalam *Carnegie Papers Middle East Program* No.101 Bulan Agustus 2009.
- Supriatma, Antonius Made Tony, "Menguatnya Kartel Politik Para Bos", dalam *Jurnal Prisma* Volume 28 Nomor 2 Oktober 2009

Tu, Teresa, “Strongmen and Their Organizations: An Examination of Junbesh in Balakh and The Taliban in Kandahar”, dalam *Tesis* MA, Universitas Georgetown, 2011.

Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD

Vel, Jacqueline, “Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic Setting”, dalam *Indonesia* Nomor 80 Oktober 2005.

Wawancara dengan Ahmad Shidqi, selaku Ketua KPUD Sleman, 24 November 2014.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Shidqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 14 November 2014.

Wawancara dengan Husni Herianto, selaku Wakil Ketua DPC Gerindra Sleman, tanggal 3 Desember 2014

Wawancara dengan Muh. Arif P., selaku Sekretaris DPC GERindra 21 November 2014.

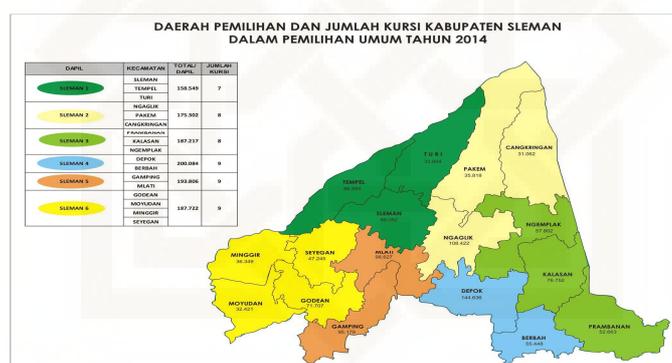
Wawancara dengan R Sukaptono selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal 12 November 2014.

Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris DPC Gerindra Sleman, tanggal 24 November 2014.

2. Parpol merupakan institusi penting di dalam demokrasi. Tanpa Parpol maka demokrasi tidak akan berjalan, dalam arti demokrasi perwakilan. Karena itu agar masyarakat tidak antipati, tidak benci, tidak suka terhadap Parpol, oleh karena itu seharusnya Parpol mereformasi dirinya, melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam kelembagaannya. *Recruitment* harus mengutamakan orang-orang yang berkualitas bukan fasilitas
3. Parpol harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi artikulasi dan penyebaran aspirasi harus dijalankan. Jangan terjadi lagi seperti selama ini yang dikritik oleh masyarakat bahwa Parpol memperjuangkan diri sendiri dan kelompoknya, tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DPRD Untuk Kabupaten Sleman sendiri ada 6 dapil yang terdiri dari 17 kecamatan dengan jumlah alokasi kursi sebanyak 50 kursi terdiri dari Partai Nasdem lima kursi, PKB lima kursi, PKS enam kursi, PDIP 12 kursi, Golkar empat kursi, Gerindra tujuh kursi, PPP empat kursi Provinsi sebanyak 259 dan DPRD Kabupaten/ Kota sebanyak 2.102 dapil. Berikut gambaran dari wilayah daerah pemilihan Kabupaten Sleman:

Gambar 2:
Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum 2014



Sumber: Arsip DPC Gerindra Sleman 2014

Hal ini telah diputuskan berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Sleman yang digelar pada Senin, 12 Mei 2014, ditetapkan 50 kursi DPRD Sleman untuk periode 2014-2019 berdasarkan perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 terdiri dari Partai Nasdem lima kursi, PKB lima kursi, PKS enam kursi, PDIP dua belas kursi, Golkar empat kursi, Gerindra tujuh kursi, Demokrat satu kursi, Gerindra enam kursi, PPP empat kursi, sementara Partai Hanura, PBB dan PKPI tahun 2014 tidak mendapatkan kursi DPRD Sleman.

Rapat pleno tersebut dihadiri para saksi dari partai peserta Pemilu Legislatif April 2014, juga Ketua KPU DIY, Polres Sleman. Dandim Sleman, serta Panwaslu Sleman. Ketua KPU Kabupaten Sleman Ahmad Shidqi mengatakan, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, hasil perolehan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Sleman yang terdiri berasal dari enam Dapil di seluruh Kabupaten Sleman, jumlah totalnya mencapai 50 kursi.¹³ Berikut nama-nama Anggota Legislatif DPRD Sleman terpilih beserta daerah pemilihan (Dapil I-IV):

Tabel 1:
Daftar Daerah Pemilihan Legislatif dan Nama Calon Legislatif
Kabupaten Sleman Periode 2014-2019

No	Daerah Pemilihan I (Dapil I) Nama	Partai
1	Danang Sulistya Haryana	Partai Nasdem
2	H.Wawan Prasetia	PKB
3	Agus Riyanto	PKS
4	Haris Sugiharta	PDIP
5	Danang Maharsa	PDIP
6	R. Sukaptana	Partai Gerindra
7	Aris Suranto	PAN
Daerah Pemilihan II (Dapil II)		
8	Sukarjo	Partai Nasdem
9	Yani Fathu Rahman	PKS
10	Dwi Yogamashinta	PDIP
11	Timbul Saptowo	PDIP
12	Ari Wicaksono Putro	Partai Golkar
13	Farida Fuatwati	Partai Gerindra
14	R. Inoki Azmi Purnomo	PAN
15	Nuryanta	PPP
Daerah Pemilihan III (Dapil III)		
16	Surana	Partai Nasdem
17	Tri Nugroho	PKB
18	Hendrawan Astono	PKS
19	Andreas Purwanto	PDIP

¹³Wawancara dengan Bapak Ahmad Shidqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 14 November 2014.

20	Nila Rifianti	PDIP
21	Prasetyo Budi Utomo	Partai Golkar
22	Biyanto	Partai Gerindra
23	Nurhidayat	PAN
Daerah Pemilihan IV (Dapil IV)		
24	Remila Mursinta	Partai Nasdem
25	Rahayu Widi Nuryani	PKB
26	Darul Falah	PKS
27	Budi Sanyata	PDIP
28	Sunarto	PDIP
29	Suwarno	Partai Golkar
30	Muhamad Arif Priyosus	Partai Gerindra
31	Nuril Hanifah	PAN
32	Iffah Nugrahani	PPP
Daerah Pemilihan V (Dapil V)		
33	Ismi Sutarti	Partai Nasdem
34	Fika Chusnul Chotimah	PKB
35	Hasto Karyantoro	PKS
36	Y.Gustan Ganda	PDIP
37	Sri Muslimatun	PDIP
38	Dara Ayu Suharto	Partai Gerindra
39	Subandi Kusuma	Partai Gerindra
40	Ida Suryanti	PAN
41	Rahayu Widichahyani	PPP
42	Nafsir Fauzi	PKB
43	Sofyan Setyo Darmawan	PKS
44	Ramelan	PDIP
45	Bambang Sigit Sulaksono	PDIP
46	Sukamto	Partai Golkar
47	Bharmanti Juni Laksana	Partai Gerindra
48	Jaka Purwanta	Partai Demokrat
49	Arif Kurniawan	PAN
50	Untung Basuki Rahmad	PPP

Sumber: KPUD Sleman, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa Gerindra mengalami kenaikan, dari satu kursi di Pemilu 2009, menjadi 7 Kursi di pileg 2014, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak di Pileg 2014, namun bukan berarti PDIP yang menjadi pemenang melainkan Partai

Gerindra yang menjadi jawara pemilu legislatif (pileg) 2014 di Sleman. Tentu saja itu bukan hasil perolehan suara total. Tapi potensi lonjakan perolehan kursi di DPRD Sleman. Dari hanya satu kursi pada Pileg periode 2009, kini meroket menjadi tujuh kursi. Setidaknya, itu estimasi potensi perolehan kursi DPRD Sleman periode 2014-2019 dari pleno hasil rekapitulasi penghitungan jumlah suara partai oleh KPU Kabupaten Sleman.¹⁴ Berikut nama-nama anggota legislatif DPRD Kabupaten Sleman dari partai Gerindra:

Tabel 2
Jumlah Anggota Legislatif Partai Gerindra dan Perolehan Suara dalam Pileg 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Sleman

Nama Caleg	Dapil	Perolehan suara
HR.Sukaptana	I	6.086
Farida Fuatwati	II	3269
Biyanto	III	4684
M. Arif Priyosusanto, S.Si	IV	2394
Subandi Kusuma, SH.	V	4443
Dara Ayu Suharto	V	7730
Brahmanti	VI	1875
Jumlah Total Suara		30.481

Sumber: Arsip DPC Gerindra Sleman 2014

Ketua DPC Partai Gerindra Sleman R Sukaptono sekaligus terpilih sebagai anggota dewan legislatif kabupaten Sleman periode 2014-2019, menambahkan, prestasi itu bermula dari penjangkaran kader untuk menjadi calon legislatif (caleg). Dengan mengusung enam program aksi, di antaranya pemberdayaan pertanian, peternakan, dan pengentasan

¹⁴Wawancara dengan HR. Sukaptono, selaku ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal 12 November 2014.

kemiskinan. “Kami memang pilih caleg yang *fight* dan tahu kondisi lapangan, serta militan untuk partai”.¹⁵

Selama menjadi dewan periode 2009-2014, HR Sukaptono mengaku rajin mengawal proposal pengajuan bantuan dari warga kepada pemerintah. Sampai bantuan cair. Proses pengkaderan Gerindra, digerakkan sejak 2009. Tiap kader dikelola dan dibina tak hanya menjelang pileg. Tapi rutin pertemuan tiap dua bulan sekali, hampir mirip arisan begitu. Itu yang menurut Sukaptono mampu mendongkrak Gerindra hingga memperoleh 30.481 suara untuk wilayah dapil Kabupaten Sleman.¹⁶ Sebagaimana yang diungkapkan Bapak HR. Sukaptono berikut:

Naiknya suara Gerindra di Kabupaten Sleman, karena perjuangan Gerindra yang serius membela rakyat, mengawal setiap proposal rakyat yang masuk ke pemerintah. Jadi rakyat pun dapat menilai sendiri perjuangan Gerindra. Di samping itu, Gerindra terus bekerja untuk mengelola dan membina kader-kader militan, yang siap bekerja demi partai, jadi tidak ada hubungan kenaikan suara gerindra karena eksistensi bos-bos atau pendana dari salah seorang pengusaha atau adanya tokoh-tokoh yang berpengaruh di Sleman ini. Hal ini murni kerja keras kader dalam melaksanakan kerja di lapangan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa dalam kemenangan Gerindra dalam pileg 2014 lalu bukan karena eksistensi dari bos-bos lokal atau pendana yang siap mengawal biaya kampanye para anggota legislatif dari Partai Gerindra. Ini artinya kemenangan suara Gerindara di Sleman karena kerja keras kader-kader Gerindra di lapangan.

¹⁵Wawancara dengan HR Sukaptono, selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal 12 November 2014.

¹⁶Wawancara dengan HR Sukaptono, selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal 12 November 2014.

¹⁷Wawancara dengan HR Sukaptono, selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal 12 November 2014.

Otoritas yang sifatnya pribadi terlebih menggerakkan kekuasaannya untuk pendulangan suara di Gerindra bukan karena konteks kekuasaan atau power dari seseorang.

Secara teori eksistensi bos lokal (orang kuat) partai menunjukkan kapasitas individu yang memiliki otoritas untuk menentukan berbagai konteks kekuasaan di partai politik, terutama dalam memetakan kantong-kantong suaranya di setiap daerah pemilihan, sementara partai yang demokratis mewacanakan kolektif kolegialitas pimpinan dalam menentukan berbagai konteks kebijakan partai. Karena itu sebenarnya keberadaan orang kuat di partai seperti Gerindra Sleman ini menjadi dilema tersendiri. Dilema yang dimaksud adalah :

- a. Kehadiran orang kuat di partai ini semula diperlukan sebagai pengumpul massa dan pengumpul suara, sebagai *bumper* dan *pengandel* tatkala berhadapan dengan pihak eksternal partai – seperti diketahui bahwa “*premanisme*” secara individu maupun kelompok memiliki lingkungan, komunitas, akses dan jaringan sosial ekonomi politik yang relatif cukup mapan - karena itu keberadaan orang ini di partai menambah nilai lebih untuk memperbesar konstituen Gerindra. Namun ketika mendominasi partai – *bos lokal* - dengan kekuasaan yang sedemikian masif tentu hal ini justru banyak menghilangkan simpati konstituen.
- b. Kehadiran orang kuat partai memiliki kelemahan, otoritas individualnya dalam menentukan *policy* bisa digunakan *bumper* bagi elite yang ingin merengkuh kekuasaan dengan jalan pintas tidak melalui jalan kompetisi.

Para elite ini mengandalkan relasi dan kedekatan dengan orang kuat partai untuk mendapatkan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan contohnya seperti pada “pencalegan” tahun 2009 dan tahun 2014. Karena itu keberadaan orang kuat partai sebenarnya dapat melimitasi sekaligus juga mereduksi berlakunya peraturan partai dalam pengaturan dinamika internal partai di aras lokal.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bos lokal bersama *inner circle* di Partai Gerindra Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Mengubah wacana dan aksi kekerasan menjadi proses politik yang dialogis – persuasif;
- b. Memperluas kapasitas jaringan politik internal dan eksternal Gerindra agar lebih bisa diterima oleh masyarakat Sleman;
- c. Melakukan konsolidasi di internal DPC Gerindra agar lebih solid;
- d. Melakukan upaya pendidikan politik untuk mengubah perilaku elite Gerindra agar mereka memiliki perilaku yang demokratis; dan
- e. Memberi keleluasaan elite Gerindra untuk berkompetisi dalam berebut kekuasaan.

Perubahan wacana dan aksi ini dilakukan agar Gerindra menjadi partai yang lebih terbuka, demokratis dan menghindari konflik yang tidak perlu, dengan harapan agar Gerindra lebih bisa diterima oleh masyarakat Yogyakarta yang prural. Tanpa harus menggunakan kekerasan, orang kuat di Partai ini dalam berbagai konteks kekuasaan sukses antara lain:

- a. Sukses menghantarkan wakilnya sebagai wakil ketua DPRD Sleman

- b. Berhasil menghantarkan tujuh orang kaderya menjadi anggota DPRD Sleman periode 2014 – 2019.
- c. Sukses menghantarkan sebagai Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) Sleman.

Setiap elite ingin melanggengkan kekuasaan, bagi elite kekuasaan telah memberikan segala-galanya mulai dari kemudahan sampai pengaruh yang besar untuk memerintah orang lain, oleh karena itu sumber-sumber kekuasaan yang dipegangnya harus dipertahankan sampai kapanpun, banyak cara untuk melanggengkan kekuasaan mulai dari penggunaan kekerasan (*koersif*) sampai pada bujukan (*persuasif*), mulai dari penguatan kelompok militer agar berdiri memagari dari unsur-unsur subversif terhadap kekuasaannya sampai kepada meningkatkan popularitas melalui *marketing* politik agar dalam pemilihan umum dan pilkada menjadi *incumbent*. Namun meskipun demikian, orang kuat partai yang buruk tetap ada. orang kuat partai yang buruk melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara:

- a. Melakukan kriminalitas dalam apresiasi kekuasannya.
- b. Penggunaan *coersive violence* atau kekerasan fisik dalam memerintah;
- c. Menciptakan ketergantungan : partai , massa, elite lain kepada orang kuat (relasi *patron-client*);
- d. Menciptakan ketidak stabilan dalam partai (konflik terus menerus).

Sebaliknya orang kuat partai yang baik melanggengkan pengaruh dan kekuasaannya di partai menggunakan cara :

- a. Berusaha menjadi populis – mendekati diri kepada massa Gerindra yang mendukungnya;
- b. Mencari pengganti dilingkungan elite Gerindra sendiri – orang yang dipercaya dan dapat menopang pengaruh orang kuat tersebut di Gerindra;
- c. Mengeksploitasi dirinya agar bermanfaat bagi masyarakat dan Gerindra;
- d. Menyerahkan aset dan akses yang dimilikinya untuk kepentingan Gerindra; dan
- e. Bertindak sebagai bapak masyarakat yang berfungsi sebagai penasehat, pemberi petunjuk, memberi saran kepada partai atau elite Gerindra.

Elite oligarki adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, karena itu mereka berusaha mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya, adapun cara- cara untuk melanggengkan kekuasaan kelompok ini adalah:

- a. Meningkatkan solidaritas diantara elite oligarki Gerindra;
- b. Memperkecil ruang dan lingkaran kekuasaan bagi masuknya elite baru kedalam oligarki;
- c. Mengeliminasi elite potensial dan elite tandingan agar tidak menjadi pesaing yang membahayakan kekuasaannya di Gerindra;
- d. Mengeliminasi orang, kelompok, kekuatan–kekuatan di Gerindra yang dianggap menggerogoti kekuasaannya dengan cara: intimidasi, *pressure*, membunuh karakter, sabotase, adu domba, sampai pada penggunaan kekerasan fisik.

Elite demokratis juga berusaha untuk mempertahankan kekuasaan, adapun cara untuk mempertahankan kekuasaannya adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha meningkatkan kapasitas kepemimpinannya sehingga kapasitas yang dimiliki sejalan dengan perkembangan Gerindra dan dinamika keinginan konstituen;
- b. Meningkatkan kapasitas jaringan Gerindra baik vertikal maupun horisontal, dengan semakin luas jaringan Gerindra dia sendiri juga dikenal (*populer*) di lingkungan internal partai;
- c. Melaksanakan agenda-agenda Gerindra yang menjadi kesepakatan bersama agar Gerindra lebih berkembang menjadi besar; dan
- d. Melakukan kompetisi yang sehat untuk memperebutkan dan mempertahankan suara di Gerindra.

2. Dominasi Bos Lokal, Pola Kerja dan Perannya dalam Pendulungan Suara Pileg

Berdasarkan uraian di atas, bos lokal ini memiliki pengaruh yang besar dalam memengaruhi politik di daerah dan mendudukkan para koleganya dengan mengkondisikan kantong-kantong suara di daerah. Lahirnya bos lokal di Sleman hampir sama dengan kelahiran bos-bos lokal di beberapa daerah. Di mana ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 dan berujung pada jatuhnya Soeharto yang menandai runtuhnya rezim otoriter, maka liberalisasi politik dengan ditandai dengan pemilihan kepala daerah dan pejabat legislatif secara langsung oleh rakyat dan dapat diikuti oleh seluruh warga negara mulai lahir seiring dengan hadirnya rezim reformasi. Pada masa ini lah para bos-bos lokal di beberapa daerah Indonesia, termasuk di Sleman mulai menampakkan dirinya ke permukaan

untuk ikut berkompetisi dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik yang dulunya dikuasai oleh militer dan para birokrat atau bahkan paketan dari pusat.

Sukaptono, yang telah disebutkan di atas sebagai salah satu orang kuat lokal, juga ikut menikmati liberalisasi politik yang terjadi pasca reformasi 1998 ini. Sebagai orang kuat lokal, dirinya termasuk orang yang telah memiliki kekayaan yang cukup besar di daerahnya sebelum berkecimpung di dunia politik. Luasnya tanah yang ia miliki sebelum dirinya menjadi pejabat legeslatif. Selain itu, dirinya juga sebagai pengusaha besar lokal yang bergerak dalam jasa kontruksi bangunan yang memiliki alat-alat pembangunan sendiri. Kemudian dengan modal ekonomi yang cukup besar serta kepercayaan masyarakat, karena dirinya terkenal di mata masyarakat akan kebajikannya, maka pada saat ia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, Sukaptono akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD Sleman selama dua periode tersebut.

Dengan berbagai kesuksesan dan kemajuan serta kegigihannya memperjuangkan nasib rakyat Sleman, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, akhirnya pada Pileg 2014 lalu, Sukaptono bersama wakil Gerindra lainnya berhasil lolos dengan perolehan suara yang cukup memuaskan 30.481 suara. Hal ini juga pada dasarnya juga tidak lepas dengan banyaknya pendukung partainya.

Dukungan yang cukup besar dari masyarakat pendukung, Sukaptono menunjukkan kalau ia adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar,

serta jaringan yang cukup luas dalam dunia ekonomi dan politik keberbagai kelompok. Pertanyaan kemudian, bagaimana bos lokal ini menjalankan bisnisnya disaat dirinya selama memegang menduduki jabatan legislatif? Meskipun Sukaptono (bos lokal) tidak melakukan kekerasan dan *money politics* dalam mendapatkan dukungan suara untuk memenangkan Pileg dan melanggengkan kekuasaannya, tetapi dalam mengendalikan bisnisnya, Sukaptono memiliki pola yang hampir mirip atau bahkan bisa dikatakan dengan kajian Hadiz dan Sidel tentang bos-bos lokal dalam mendapatkan monopoli atas kekayaan negara. Hal ini dapat dilihat dari tender proyek pembanguna jalan yang ada misalnya, dapat dijalankan oleh perusahaan kontruksi yang dimiliki oleh Sukaptono.

Penyusun melihat hal demikian dilakukan demi tetap terjaganya alokasi ekonomi tetap terjaga. Selain itu, Sukaptono juga menjalin hubungan dengan kroni-kroni, teman, dan keluarganya yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Tidak hanya itu, bahkan ia ikut menjadi Tim Sukses, Andika Pandu Puragabaya anak pensiunan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, maju menjadi DPR RI dari Partai Gerindra bahkan dengan mengejutkan dapat mengalahkan Ketua Umum Gerindra sendiri yakni Suhardi yang basicnya sebagai Guru Besar UGM. Dengan modal ketenaran dan kewibawaan bersama Kanjeng Pangeran Hario (KPH) Wironegoro selaku Ketua Dewan Pembina DPD Yogyakarta dan sekaligus anak mantu pertama Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Bhuwono X, dan Brigadir Jenderal Purnawirawan RM. Noeryanto. Bahkan

berdasarkan data yang penyusun dapatkan Andika Pandu Puragabaya mendapatkan suara terbanyak untuk daerah Yogyakarta, yakni 72.290 suara, untuk partai yang baru dua kali ikut pemilu dengan caleg yang belum atau bahkan tidak dikenal di masyarakat. Hal ini merupakan kemenangan besar bagi Gerindra.

Dari penjelasan di atas memberikan gambaran atau bentuk yang cukup unik dari bosisme lokal. Di mana bosisme di Sleman sudah mulai menunjukkan wajah barunya untuk menjadi lebih baik dibandingkan pola-pola kerja bos-bos lokal di daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Meskipun dalam alokasi sumber ekonomi masih melakukan monopoli atas kekayaan negara di tingkat lokal. Tetapi menurut penyusun setidaknya Sukptono, sebagai bos lokal, sudah menunjukkan kinerjanya yang cukup bagus sebagai wakil dewan di pemerintahan Sleman. Hal inilah yang kemudian menjadikan Gerindra Sleman termasuk dalam pemenang Pileg 2014 dengan menempatkan tujuh wakilnya di DPRD.

Selain itu, fenomena ini juga memberikan gambaran dari corak demokratisasi di tingkat lokal Indonesia dengan wajah barunya yang berbeda. Di mana liberalisasi politik yang merupakan bentuk konsekuensi logis dari digunakannya demokrasi sebagai sistem politik, yang memberikan hak yang sama pada warga negara untuk berkompetisi menduduki jabatan-jabatan publik mulai dari kepala Daerah, pejabat legislatif, tapi masih saja didapatkan seseorang yang dapat mendulang suara hampir 100 persen. Di mana biasanya seperti di kebanyakan daerah dan negara lainnya, dengan

adanya persaingan yang bebas dan adil cukup sulit dan jarang untuk mendapatkan suara yang dominan, kecuali dalam pelaksanaannya ada unsur-unsur lain. Berikut uraian pola kerja dan peranan bos lokal dalam mendulang suara.

a. Menjalankan kontrol atas masyarakat

Dalam menjalankan kontrol atas masyarakat ada beberapa pola yang dilakukan bos lokal, diantaranya adalah kharismatik diri, kontrol terhadap LSM lokal, meredam jurnalis yang memberitakan kejelekan partai, memobilisasi dukungan paguyuban etnis dari berbagai kalangan, dan merekrut aktivis gerakan reformasi.

1) Kharismatik diri bos partai dan kader

Salah satu kemenangan Partai Gerindra di Sleman, yang baru dua kali mengikuti pemilihan umum didukung oleh munculnya tokoh kharimatik mengenai sosok pemimpin yang diharapkan masyarakat dan giatnya kader-kader Partai Gerindra di Dewan memperjuangkan dan mengawal serta mengawasi proposal bantuan ke masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman khususnya di plosok-plosok pedesaan dapat rutin mendapatkan bantuan sosial yang dikawal langsung oleh partai Gerindra. Tentunya ini tidak lepas dari citra bos Partai sebagai pendana dan kader opartai Gerindra yang mengawasi dan memantau langsung bantuan ke masyarakat terus-menerus berkembang dan mulai mendapat pengakuan di tengah masyarakat Sleman.

Kader Partai Gerindra baik di Dewan maupun di tingkat ranting berhasil membangun pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Bahkan Gerindra menjadi partai baru yang perlu diperhitungkan dalam pemilu berikutnya. Partai Gerindra dan para kader-kadernya mulai dikenal dan bertambah terkenal ketika mengingat Pendiri Partai, yakni Prabowo Subiyanto ketika mencalonkan jadi Presiden. Hingga saat ini orang mengingat Gerindra maka akan mengingat Prabowo Subiyanto.

Partai Gerindra Sleman dan kader-kadernya dikenal sangat dekat dan dikenal masyarakat terutama melalui kinerja partai dan dewan serta kadernya. Setiap proposal bantuan yang masuk ke pemerintah, terus mengawal dan mengawasi serta melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah dengan langsung memberikan sumbangan kepada masyarakat masyarakat setempat sesuai dengan bantuan yang diberikan, baik bantuan modal (uang) maupun barang. Hal ini yang membuat kader Partai Gerindra mulai diingat masyarakat Sleman.

HR Sukaptono, misalnya salah satu kader partai Gerindra dan sekaligus sebagai Ketua DPC Sleman yang juga masih keturunan darah biru (Keturunan Keraton Yogyakarta) cukup dekat dengan masyarakat. Saking dekatnya kalau masyarakat melihat dia (HR. Sukaptono) datang masyarakat cukup antusias. Sebagai wakil rakyat dia cukup dikenal dan dekat dengan masyarakat dan gigih memperjuangkan kemakmuran rakyat Sleman. Ia juga dikenal cukup dermawan. Begitu kedermawan ini yang cukup dikenal. Ada orang yang patut dia sumbangkan dananya, disumbangkan. Dalam bentuk apapun apakah uang

ataupun barang dan sebagainya. Inilah yang dikenal dan sulit dilupakan masyarakat.¹⁸

Kharismatik bos lokal partai dan kadernya yang dermawan, secara sistematis dibangun bos loka. Mereka membuat semacam ritual masyarakat untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menyalurkan bantuan tepat sasaran. Ritual ini dilakukan setiap ada bantuan proposal yang masuk dan melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini dilakukan secara rutin sejak partai ini berdiri.

Kenaikan suara Gerindra juga dinilai melanjutkan politik pencitraan yang dibangun oleh para bos lokal. Pendekatkan diri dengan masyarakat melalui sumbangan-sumbangan melalui para bos lokal. Tidak saja menyumbang kepada masyarakat, mereka juga rutin menyumbang kepada ormas agama, yang diyakini memiliki massa yang kuat. Inilah kecenderungan politik pencitraan yang dibangun para bos lokal.

Berangkat dari opini inilah masyarakat (pemilih) mengira Gerindra memberikan sumbangan dan bantuan dari kantongnya pribadi. Padahal sebenarnya Gerindra memberikan sumbangan menggunakan dana-dana bos lokal seperti dana bantuan yang untuk menimbulkan pencitraan partai. Hal ini yang kurang dipahami masyarakat.

¹⁸Wawancara dengan dengan Bapak RBT, selaku Kepala Desa Mlati Sleman, pada tanggal 22 November 2014.

Dengan kharismatik bos lokal di Partai Gerindra, masyarakat dapat mempersepsikan Gerindra sebagai partai yang baik. Kader Gerindra dipandang tidak tamak, tidak memperkaya diri dan bekerja hanya untuk pengabdian. Persepsi ini diberikan agar masyarakat publik lebih kritis dan mendapatkan informasi yang obyektif, sehingga dengan demikian suara pemilih tidak dapat lari.

Menurut Muh. Arif P. selaku Sekretaris DPC Gerindra bahwa Gerindra berhasil membangun citra yang baik mengenai dirinya sehingga dapat memenangkan suara pemilu.¹⁹ Citra yang baik tersebut di antaranya pengusaha sukses Sleman yang berasal dari keluarga pengusaha besar di Sleman dan memiliki sebagian besar pertokoan dan konstruksi bangunan di Sleman. Kader Gerindra juga dikenal sebagai sosok yang berkecukupan namun memiliki sifat kedermawanan. Sehingga sangat kecil kemungkinan Gerindra menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi.

2) Kontrol terhadap LSM lokal

Dalam mendulang suara Pileg 2014, para bos lokal Gerindra dan kader-kadernya mengontrol terhadap LSM yang berusaha untuk mengkritisi kejelekan partai. Dalam hal ini, dapat dikatakan berhasil mengendalikan LSM lokal di Sleman dengan baik. Para bos lokal dan kader partai melakukan pendekatan ke beberapa elit LSM lokal di

¹⁹Wawancara dengan Bapak Muh. Arif P. selaku Sekretaris DPC Gerindra 21 November 201

Sleman. Pendekatan yang dilakukan para bos lokal melalui pemberian berbagai bantuan kepada LSM tersebut. Misalnya kemudahan pencairan dana kegiatan organisasi mereka. sebagaimana yang diakui oleh Bapak Muh Arif selaku Sekretaris DPC Gerindra berikut: “Partai Gerindra dan kadernya harus bisa melakukan pendekatan dengan LSM, terutama LSM yang melakukan perjuangan advokasi terhadap rakyat dengan menawarkan fasilitas-fasilitas”.²⁰

Setiap hendak menyampaikan misi kerja partai, para bos lokal juga memobilisasi dukungan melalui ormas dan LSM pendukungnya. Ormas dan LSM tersebut digunakan untuk membungkam suara-suara kritis pengkritik terhadap partai Gerindra. Ormas dan LSM tersebut secara terbuka belum ada yang melakukan represi terhadap kelompok pengkritik Gerindra mengingat belum juga ada perlawanan yang keras terhadap Gerindra di Sleman.

Dalam Partai Gerindra juga membangun kelompok militan. Ini sudah terbukti ketika pemilihan legislatif kemaren. Jadi kelompok-kelompok pendukung Pileg. termasuk LSM dan Ormas memberikan dukungannya. Namun kelompok yang terbentuk pada prinsipnya tidak mematikan gerakan LSM yang kritis.²¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa jika ada perlawanan yang diberikan kelompok LSM atau ada represi, disinyalir para bos lokal Gerindra mengadakan atau melakukan intimidasi

²⁰ Wawancara dengan Muh. Arif P., selaku Sekretaris DPC Gerindra selaku Ketua DPC, pada tanggal 22 November 2014

²¹ Wawancara dengan Muh. Arif P., selaku Sekretaris DPC Gerindra selaku Ketua DPC, pada tanggal 22 November 2014.

apabila kooptasi yang dilakukan gagal. namun tidak diketahui seperti apa bentuknya. Masyarakat lebih mudah terkooptasi melalui desentralisasi. Tidak heran jika banyak aktivis LSM mempunyai profesi sampingan sebagai kontraktor partai atau pemerintah daerah. Mayoritas masyarakat bisa dikatakan pada umumnya apatis dan hanya tertarik dengan politik ketika pemilu berlangsung. Sedangkan elemen masyarakat yang kritis didominasi aktivis LSM. Namun mereka (LSM) ini hanya kritis untuk mencari proyek dari pemerintah daerah. “Mayoritas masyarakat Sleman apatis hanya heboh kalau mau pemilu. Yang kritis banyak orang mahasiswa tapi ujungnya paket (proyek) juga”.²² Hal inilah yang disayangkan Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken bahwa ada banyak ratusan LSM lokal yang berdiri di sebuah daerah namun hanya sedikit yang bersikap kritis. Mayoritas bisa ditundukkan oleh elit lokal.²³

3) Meredam Jurnalis

Salah satu kunci keberhasilan bos lokal mendulang suara Pileg 2014 lalu adalah meredam media yang memberitakan kejelekan dari Partai Gerindra. Bos lokal mengontrol melakukan kontrolnya terhadap media massa di Sleman. Terutama koran-koran besar seperti Tribun, Kedaulatan Rakyat, Republika, dan Harian Jogja. Melalui

²²Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22 November 2014.

²³Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta : YOI, 2007), hlm. 491-503.

kedekatannya dengan media massa, sehingga mereka berhasil menanamkan citra yang positif tentang partai dan kadernya.

Media massa di Sleman dikontrol dengan baik, meskipun terkadang masih ada yang memberitakan Gerindra tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pers. Karena bagi pimpinan perusahaan tidak ada gunanya melawan (pemilik kekuasaan media massa) karena tidak akan kebagian iklan. Bagi wartawan di lapangan tidak ada gunanya menulis kritis tentang pemerintahan yang berkuasa karena pasti tidak akan dimuat oleh redaksi. Oleh karena itu, Gerindra berusaha meredam jurnalis yang isi beritanya tidak benar dengan data yang diambil.

Bos lokal di Gerindra mendekati media massa demi pencitraan yang baik tentang partainya. Pendekatan tersebut dilakukan agar mendapat dukungan dari media

Gerindra mendekati media untuk meredam jurnalis yang isi beritanya tidak benar dengan data yang ada. Meskipun terkadang masih ada yang memberitakan Gerindra tidak sesuai dengan kenyataan. Disamping itu, kedekatan dengan media agar masyarakat lebih mengenal partai Gerindra dan tokoh-tokohnya.²⁴

berdasarkan wawancara di atas, sesuai dengan pendapat David T. Hill, bahwa ada dua strategi yang biasanya dilakukan rezim Orde Baru dalam mengontrol jurnalis di Indonesia, yaitu membeli atau mengintimidasi. Dua strategi ini ternyata bertahan pada era

²⁴Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22 November 2014.

desentralisasi. Keberhasilan dalam pemilu sangat ditentukan oleh kemampuan kandidat mempunyai akses terhadap media massa lokal. Melalui penelitiannya pada empat pemilu, David T. Hill melihat akses terhadap media massa lokal memperbesar pengaruh politik terhadap pemilih.²⁵ Strategi membeli jurnalis inilah yang dilakukan oleh bos lokal Gerindra dalam mengontrol pers di Sleman.

4) Memobilisasi Dukungan Paguyuban Etnis

Bos lokal di Gerindra memanfaatkan paguyuban etnis dalam menggalang dukungan masyarakat. Melalui organisasi-organisasi etnis, Gerindra hendak menanamkan pengaruh yang kuat melalui strategi kultural. Gerindra menugaskan kerabatnya dan kroninya untuk menguasai berbagai paguyuban etnis di Sleman. Gerindra memanfaatkan etnis dan budaya untuk kepentingan politiknya. Gerindra hendak memobilisasi masyarakat yang masih punya kesetiaan etnis di Sleman. Sebab, apa yang dilakukan Gerindra tidak dilakukan elit-elit lain.

Gerindra punya tim yang tidak struktural. Para kyai-kyai, para tua-tua, para tokoh-tokoh masyarakat, kelompok pemuda, baik dari luar daerah. Semua dilakukan pendekatan. Sebab partai lain jarang yang melihat ke arah sana bahwa budaya bisa bermanfaat untuk kepentingan politis. Disini pula tertanam pada Kadernya, dimana mereka lebih malu ditegur Ketua Paguyuban ketimbang ditegur Lurah atau Camat.²⁶

²⁵David T. Hill, "Assesing Media Impact on Local Elections in Indonesia", dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS, 2009), hal 229-235.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22 November 2014.

Menurut Benny Subianto, simbol-simbol etnis yang melahirkan politik etnis berlangsung di Indonesia era desentralisasi. Simbol-simbol etnis berpengaruh besar terhadap kemenangan kandidat dalam pemilu. Dalam pemilu seorang kandidat akan juga dilihat secara personal berdasarkan daerah asalnya, bahasa ibunya dan etnisnya oleh pemilih.²⁷ Organisasi etnis berkembang pesat di Indonesia era desentralisasi. Organisasi ini memiliki kedekatan antara anggota dengan pengurus. Biasanya organisasi ini beraktivitas non politis. Namun ketika pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan, pengurus organisasi etnis akan menggiring anggotanya mendukung kandidat tertentu.

5) Merekrut Aktivis Gerakan Reformasi

Banyak aktivis gerakan reformasi di Sleman yang menjadi kekuatan politik pendukung Gerindra. Terlebih ketika Pileg dipilih langsung, peranan aktivis gerakan reformasi semakin besar sebagai kekuatan yang menopang suara Gerindra dan untuk membangun kekuasaan di daerah. Salah satu bukti kehebatan bos lokal di Partai Gerindra untuk mendulang suara di Sleman adalah keberhasilannya mengkooptasi banyak aktivis gerakan mahasiswa ke dalam barisan pendukungnya. Gerindra menjadi patron bagi aktivis gerakan mahasiswa 98 di Sleman. Sebagian besar aktivis gerakan 98 menjadi

²⁷Benny Subianto, "Ethnic Politics and The Rise of The Dayak Bureaucrats in Local Elections : Pilkada in Six Kabupaten in West Kalimantan", dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS, 2009), hal 327-330.

kekuatan pendukung Gerindra. Gerakan mahasiswa terkooptasi karena sistem yang dibangun feodal. Patron-klienya sangat kuat. Ketika sosok Fadli Zone menjadi Sekjen Gerindra, sebagian besar kekuatan reformasi (aktivis 98) menjadi kekuatan pendukung.

Menurut Mikaela Nyman, aktivis gerakan 98 di Indonesia mengalami kendala tidak bisa bersatu pasca kejatuhan Soeharto. Tidak ada kesepakatan strategi apa yang dilakukan pasca jatuhnya Soeharto. Mereka juga tidak berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan politik terutama pada institusi-institusi politik formal hasil reformasi. Mereka tidak mampu masuk ke dalam arena politik formal pada era pasca reformasi.²⁸

Karakter oposisi termasuk gerakan mahasiswa pada masa sentralisme Orde Baru adalah secara institusional tidak terorganisir dengan baik, terpecah dan multi ideologi. Ketika berada di era transisi maka kekuatan oposisi ini akan berhadapan dengan kekuatan otoriter yang masih kuat. Hasilnya oposisi tetap lemah dan konsolidasi cepat dilakukan kelompok otoriter yang muncul menjadi penguasa. Hasilnya tidak ada pembeda yang jelas antara reformis dan status quo.

b. Dukungan dari Kelompok Militan

Dalam mendulang suara, para bos lokal di Gerindra tidak lepas dari melakukan praktek-praktek intimidasi melalui kaki tangannya, sebuah

²⁸Mikaela Nyman, "Civil Society and the Challenges of the Post-Suharto Era", dalam Marco Bunte dan Andreas Efen (ed), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London : Routledge, 2009), hal 251-270.

ormas kepemudaan. Ormas kepemudaan ini akan melakukan intimidasi terhadap aktivis-aktivis atau kelompok yang berani melakukan kritik. Ormas kepemudaan sebenarnya tidak terlalu besar lagi di Sleman, namun tetap saja masih diperhitungkan. Namun bentuk intimidasi ini berupa apa, tidak diketrahui secara jelas, namun hal ini menurut Bapak Sarjito hanya untuk mengantisipasi, sebagaimana berikut:

“Menurut saya ada dukungan kelompok militan, terutama dalam mengamankan suara adalah penting, terutama terhadap kelompok yang melakukan kecurangan-kecurangan di pos-pos kantong suara pemilihan. Hal ini dilakukan hanya untuk mengantisipasi, bukan hal-hal yang negatif. seperti perlawanan, ancaman, ataupun kekerasan.”²⁹

Fenomena kelompok militan ini di Sleman menjadi sebuah pameo di masyarakat untuk menang Pileg dan tidak sedikit mengajak yang notabenehnya preman- preman untuk dijadikan tim sukses. Dengan demikian bos lokal di Gerindra dinilai dapat mengontrol kelompok-kelompok preman.

Berdasarkan hal-hal di atas, kemenangan Partai Gerindra bukanlah sebuah kejutan. Justru kejutannya kalau Partai Gerindra kalah dalam pemilihan Legislatif 2014 lalu di Dapil Sleman. Partai Gerindra menang karena faktor peran bos lokal yang telah banyak membangun jaringan politik di tingkat atas maupun bawah di Sleman.

Sebagai Partia yang masih sangat muda, kemenangan Partai Gerindra merupakan kinerja keras yang dilakukan para kader dan pendukungnya (bos lokal), dan oleh karena itu pola kerja dan peran bos lokal yang mengusung

²⁹Hasil Wawancara dengan Sarjito Misdi, selaku Wakil Sekretaris, pada tanggal 22 November 2014.

dan mendonasinya (Gerindra) punya peran yang besar sekali terhadap pendulangan suara di Dapil Sleman dalam Pileg 2014 lalu. Kemenangan ini dilihat dari Pileg 2009 yang hanya menempatkan wakilnya atau kadernya satu orang, namun Pileg 2014 menjadi tujuh orang. Saya kira itu wajar sekali. Karena peran Orang lokal dan jaringan politik yang luas membuat kenaikan suara Partai Gerindra. Banyak orang kuat dan bos lokal yang loyal mengabdikan di sana. Justru kalau Partai Gerindra kalah itu aneh, sebagaimana diakui oleh Sukaptono berikut ini:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak di Pileg 2014, namun bukan berarti PDIP yang menjadi pemenang melainkan Partai Gerindra yang menjadi jawara pemilu legislatif (pileg) 2014 di Sleman. Tentu saja itu bukan hasil perolehan suara total. Tapi potensi lonjakan perolehan kursi di DPRD Sleman. Dari hanya satu kursi pada Pileg periode 2009, kini meroket menjadi tujuh kursi. Setidaknya, itu estimasi potensi perolehan kursi DPRD Sleman periode 2014-2019 dari pleno hasil rekapitulasi penghitungan jumlah suara partai oleh KPU Kabupaten Sleman.³⁰

Berdasarkan wawancara di atas, dapat ditegaskan bahwa kemenangan Partai Gerindra karena adanya pengaruh dan peran orang-orang kuat lokal atau bos lokal yang dapat mengatur pendulangan di Dapil Sleman. Mereka merupakan aktor yang berpengaruh dan disegani meskipun mereka tak langsung terjun ke lapangan. Selain Gerindra juga memiliki kelebihan sebagai Partai baru yang banyak menarik simpatisan bagi pemilih baru dari berbagai kalangan. Lawan beratnya, PDI Perjuangan secara *de facto* menang, namun PDI Perjuangan merupakan partai pemain lama yang sudah

³⁰Wawancara dengan R Sukaptono selaku Ketua DPC Gerindra Sleman, pada tanggal 21 November 2014.

beberapa kali mengikuti pemilu. Bahkan PDI Perjuangan di Yogyakarta atau Sleman merupakan basis suaranya.

Partai Gerindra menang karena dia merupakan partai yang masih sangat muda. Gerindra memiliki tokoh yang disegani dan kharismatik di sana. Partai Gerindra juga memiliki bos lokal yang siap dan loyal mengabdikan kepada partai dan tak diragukan lagi kinerjanya. Sebagaimana diakui oleh KPUD Bapak Ahmad Shidqi Sleman berikut ini:

Gerindra menjadi pemenang Pileg 2014 karena melihat pemilu 2009, Gerindra hanya menempatkan satu wakilnya di Anggota DPRD, mungkin pada waktu itu masyarakat belum mengenal Partai Gerindra. Namun di Pileg 2014 ini, Gerindra justru tampil sebagai pemenang, meskipun PDI Perjuangan memperoleh suara sebanyak 12 Suara untuk Dapil Sleman. Tentu hal ini sangat berarti bagi Partai Gerindra.³¹

Bagi kader Gerindra sendiri menilai banyak faktor yang menyebabkan kemenangan partainya. *Pertama*, Gerindra sudah dikenal masyarakat terutama pada kalangan pemilih pemula. *Kedua*, Paguyuban etnis juga dimobilisasi. *Ketiga*, Gerindra Sleman mempunyai 30.000-an pemilih berdasarkan hasil pemilu 2014. Tetapi faktor terbesar tentu citra dan kader Gerindra sendiri yang loyal dan militan. Di sampingnya itu adanya, para donasi dari masyarakat yang mendanai langsung Pileg 2014 di Sleman; dan ketiga Partai Gerindra dikenal masyarakat, karena kinerja kadernya yang militan. Gerindra garap pemilih pemula. Paguyuban (etnis) kami dari partai yang garap. Para donator (penyebutan bos lokal), kader yang militan

³¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Shidqi selaku Ketua KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 14 November 2014.

Gerindra juga turun kesana dalam mengkampanyekan caleg-caleg Gerindra.

Adanya bos lokal yang berperan mengusung dan mendulang suara.



- f. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹²

2. Fungsi Partai

Ada beberapa fungsi yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra, yaitu:

- a. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa;
- b. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- c. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila;
- e. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara;
- f. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- g. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- h. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan

¹²Anonim, *Arsip Profil Partai Gerindra*, DPC Sleman, 2007.

kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³



¹³ *Ibid.*

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : Halimuddin Siregar
2. TTL : Sisumut, 20 September 1989
3. NIM : 08370018
4. Alamat Asal : Ds.Pintasan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Alamat Yogya : Jln. Legi No. 10 Papringan Sleman Yogyakarta
6. Nama Orang Tua:
 - Ayah : Ahmad Siregar
 - Ibu : Rosidah Ritonga
7. Pekerjaan Orang Tua:
 - Ayah : Petani
 - Ibu : Petani
8. Alamat : Ds.Pintasan, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD Negeri 117480 Tanjung Mulia : Lulus Tahun 2002
2. MTs Swasta Kec. Kampung Rakyat : Lulus Tahun 2005
3. MAN Rantauprapat Labuhanbatu : Lulus Tahun 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2008

PEDOMAN INTERVIEW

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatarbelakangi pendirian partai Gerindra?
2. Siapa-siapa pelopor pendirinya?
3. Apa misi, visi serta tujuan pendirinya?
4. Bagaimana strategi perekrutan kader Gerindra?
5. Program apa saja yang dilaksanakan dalam pengembangannya?
6. Apa yang Anda ketahui tentang local bosses (orang kuat)?
7. Bagaimana menurut anda adanya local bosses dalam Partai?
8. Apa kelebihan dan kekurangan dengan hadirnya local bosses terutama dalam roda kepartaian?
9. Bagaimana menurut Anda, peran atau pengaruh local bosses di partai, khususnya di DPC Sleman?
10. Gerindra merupakan salah satu pemenang dalam Pileg dan Pilpres 2014, bagaimana strategi Gerindra dalam memenangkan pileg dan pilpres terutama dalam pendulangan suara di DPC Sleman?
11. Dalam pendulangan suara kemenangan pileg dan Pilpres 2014, apa ada melibatkan peran local bosses diluar struktur kepartaian?
12. Bagaimana/ Apa bentuk keterlibatan local bosses terhadap pendulangan suara terutama di DPC Sleman?
13. Apakah menurut Anda kehadiran local bosses yang menjalankan kepartaian sesuai dengan keinginan masyarakat atau simpatisannya atau pendukungnya?
14. Apakah kehadiran local bosses secara langsung atau tidak dapat meningkatkan perolehan suara khususnya di DPC Sleman?
15. Bagaimana karakteristik local bosses di Gerindra, terutama dalam menjalankan roda kepartaian?
16. Bagaimana dan dimana peran local bosses dalam mendulang suara khusus di DPC Sleman?

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA
DI LUAR UIN SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama lengkap : Halimuddin Siregar
Nomor induk mahasiswa : 083 700 18
Program studi : SIYASAH
Tanggal lulus : 29 Jnuari 2015
Alamat asal : Desa Tanjung Mulia, Kecamatan
Kampung Rakyat, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Alamat di yogyakarta : Jl. Legi No. 10, Papringan Sleman
Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan di UGM, UNY, UII, BATAN Yogyakarta, perpustakaan daerah (Perpusda Yogyakarta dan perpustakaan lainnya)

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2015

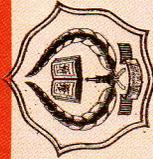


Yang menyatakan,

HALIMUDDIN SIREGAR

NIM : 08370018

Nomor: UIN.02/R.K.m/PP.00.9/1921/2008



**DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

**NAMA : HALIMUDIN SIREGAR
NIM : 08370018
FAKULTAS : SYARI'AH**

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2008/2009
Tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2008 (24 jam pelajaran) sebagai:

P E S E R T A

Yogyakarta, 2 September 2008
a.n. Rektor



Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

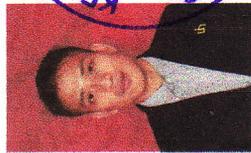
UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : HALIMUDDIN SIREGAR
 NIM : 08370018
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Jurusan/Prodi : SIYASAH
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	0	E
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Microsoft Internet	100	A
5.	Total Nilai	72,5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

KEMENTERIAN Yogyakarta, 11 Juni 2014



Kepala PTIPD
 Agung Fatmanto, Ph.D.
 NIP.197701032005011003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Sertifikat



Nomor : . PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/08

diberikan kepada:

sebagai

PESERTA

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2008

dengan tema :

*Membangun Nalar Kritis-Akademis Mahasiswa;
Berkesadaran Sosial dalam Dimensi Kebangsaan*

Yang diselenggarakan oleh :

Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2008

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tanggal 21 - 23 Agustus 2008

Mengetahui,

Pembantu Rektor III

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Maragustam Siregar, M.A.

NIP. 150232846

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abbas Firdaus Basuni

Presiden

Yogyakarta, 23 Agustus 2008

Panitia OPAK 2008

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Didi Maulidi

Ketua

Riyadys Shalihin

Oratoris Pengorganisasian Alumnus & Sekretaris
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sertifikat

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/ 2885/ 2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Halimuddin Siregar
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kota Pinang, 20 September 1989
Nomor Induk Mahasiswa : 8370018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2012/2013 (Angkatan ke-80), di :

Lokasi : Banjarasri 6
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 16 Juli s/d. 9 September 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95.00 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

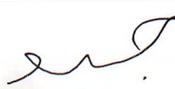
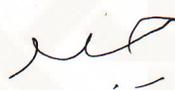
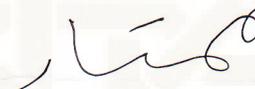
Ketua,


Zamzam Afandi, M.Ag., Ph.D
NIP. : 19631111 199403 1 002

LEMBAR TAHSIN ALQURAN

Nama : HALIMUDDIN SIREGAR

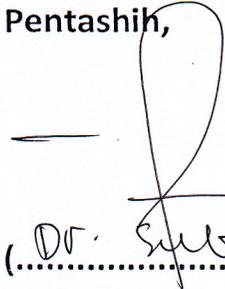
NIM : 08 370018

NO	MATERI TAHSIN	CATATAN	KETERANGAN
1	Makhras Huruf (tempat keluarnya huruf)		
2	Ahkamul Huruf (hukum-hukum huruf)		
3	Sifatul Huruf (sifat huruf)		
4	Mad wal qashr (panjang pendek)		
5	Waqaf ibtida' (berhenti dan memulai bacaan)		
6	Mura'atul huruf wal harakah (akurasi huruf dan baris)		
7	Mura'atul kalimat wal Ayat (akurasi kata dan ayat)		

Catatan diisi dengan materi apa yang masih belum sempurna untuk disempurnakan dan dicek lagi. Keterangan diisi dengan lulus atau mengulang

Yogyakarta, 26 - Juni 2015

Pentashih,



(Dr. Subandi Nugri)

NIP. 197505172005011604



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sertifikat

Diberikan kepada

Nama : HALIMUDDIN SIREGAR

NIM : 08370018

Jurusan : JINAYAH SIYASAH

telah melaksanakan Praktek Peradilan di **PENGADILAN AGAMA BANTUL**
Pada Bulan November s.d. Desember 2013.

Yogyakarta, 31 Desember 2013.

a.n. Dekan
Ketua Panitia,



Bahiey
Ahmad Bahiey, SH., M. Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/5418.b /2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Halimuddin Siregar**
Date of Birth : **September 20, 1989**
Sex : **Male**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **September 19, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	39
Structure & Written Expression	38
Reading Comprehension	45
Total Score	406

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, September 26, 2014

Director,

Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002

شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/0424.a/2014

تشهد إدارة مركز اللغات والثقافات والأديان بأن :

الاسم : Halimuddin Siregar :

تاريخ الميلاد : ٢٠ سبتمبر ١٩٨٩

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ سبتمبر ٢٠١٤ ،
وحصل على درجة :

٥٠	فهم المسموع
٣٩	التراكيب النحوية والتعابير الكتابية
٣٩	فهم المقروء
٤٢٣	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوجاكرتا، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤

المدير

الدكتور المحج هشم زيد الماجست

رقم التوظيف : ١١٦٣١١٠١١١١٠٣١٠٠٢

